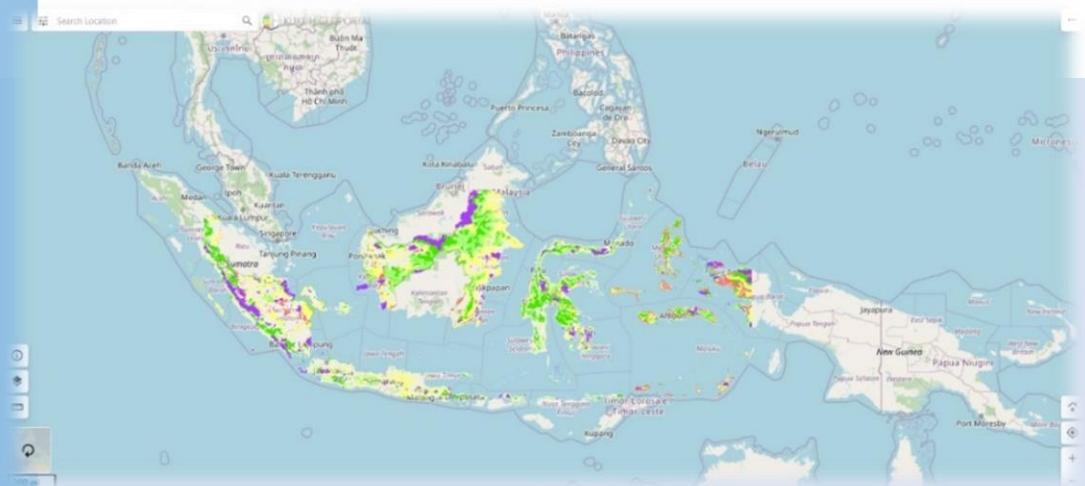




LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023



DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022 sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat.

Penyusunan laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2024
Plt. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	3
1.4. Sarana dan Prasarana	5
1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi	5
II. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis (Renstra).....	6
2.2. Rencana Kerja (Renja)	8
2.3. Perjanjian Kinerja	12
2.4. Review Atas Dokumen Perencanaan	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja	15
3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	16
3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran	16
3.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja	18
3.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja	19
3.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra	22
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
3.4. Realisasi Anggaran	65
V. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
Tabel 1.	Tugas Pokok dan Fungsi sesuai P.15 Tahun 2021	3
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 dan Tahun 2022 Berdasarkan Golongan.....	4
Tabel 3.	Komposisi dan sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	4
Tabel 4.	Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023.....	5
Tabel 5.	Target Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024.....	7
Tabel 6.	Rencana Kerja Tahun 2023.....	8
Tabel 7.	Alokasi anggaran Tahun 2023.....	10
Tabel 8.	Alokasi anggaran per unit kegiatan.....	10
Tabel 9.	Alokasi Anggaran Per Sub Direktorat/Bagian Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023.....	12
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023.....	12
Tabel 11.	Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat PPKH Tahun 2023.....	16
Tabel 12.	Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat PPKH Tahun 2023.....	18
Tabel 13.	Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2023.....	18
Tabel 14.	Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 15.	Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra.....	22
Tabel 16.	Potensi penetapan kawasan hutan dari hasil tata batas Tahun 2023.....	25
Tabel 17.	Rekapitulasi Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2022.....	27
Tabel 18.	Rekapitulasi Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2023.....	27
Tabel 19.	Rincian Penetapan Kawasan Hutan Akumulatif Per Provinsi	34
Tabel 20.	Luas Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan.....	38
Tabel 21.	Luas Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2023.....	38
Tabel 22.	Daftar SK BIRU Tahun.....	40
Tabel 23.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	65
Tabel 24.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kegiatan Tahun 2023.....	66

DAFTAR GAMBAR

<i>No.</i>	<i>Nama Gambar</i>	<i>Hal.</i>
<i>Gambar 1.</i>	<i>Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 tahun</i>	<i>2</i>
<i>Gambar 2.</i>	<i>Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tk. Pendidikan.....</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 3.</i>	<i>Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2022.....</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 4.</i>	<i>Infografis Progress Penetapan Kawasan Hutan di Indonesia.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 5.</i>	<i>Buku laporan Penyusunan Peta Indikatif PPTPKH.....</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 6</i>	<i>Kegiatan Pembahasan Penyusunan Peta Indikatif PPTPKH.....</i>	<i>44</i>
<i>Gambar 7.</i>	<i>Buku laporan data dan Informasi.....</i>	<i>48</i>
<i>Gambar 8.</i>	<i>Sistem Aplikasi SIKUKUH.....</i>	<i>53</i>
<i>Gambar 9.</i>	<i>Surat/Nota Dinas pengarsipan dokumen.....</i>	<i>56</i>
<i>Gambar 10.</i>	<i>Kegiatan penelusuran dokumen.....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 11</i>	<i>Kegiatan pemilahan dan penataan dokumen.....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 12.</i>	<i>Kegiatan digitalisasi dan entry dokumen.....</i>	<i>58</i>
<i>Gambar 14.</i>	<i>Kegiatan pemeliharaan dokumen.....</i>	<i>59</i>
<i>Gambar 15</i>	<i>Kegiatan peminjaman arsip/dokumen.....</i>	<i>59</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional. Arah kebijakan Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh disetiap sektor pembangunan dan daerah.

Peran dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 yang berisi target dan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun. Untuk target dan indikator Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2022 telah dituangkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabiliats dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan ataupun sasaran strategis dan juga perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2023 maka disusun laporan kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2023.

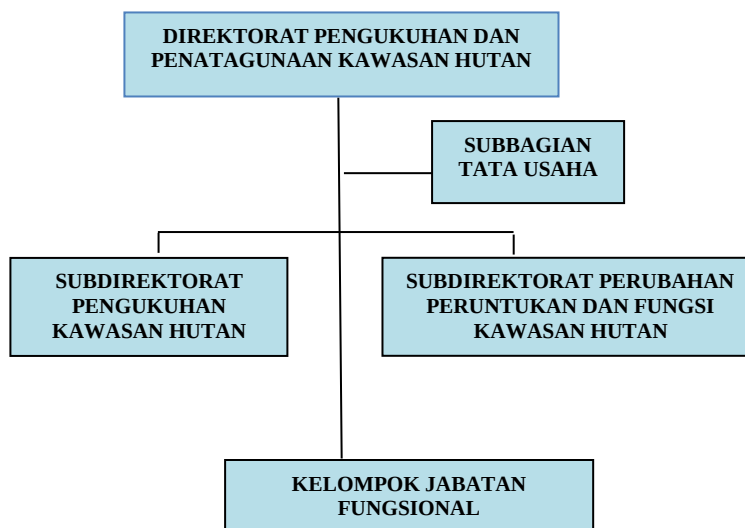
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didukung oleh 2 unit kerja eselon III dan 1 unit kerja eselon IV. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja seperti tertuang pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi sesuai P.15 Tahun 2021.

UNIT KERJA	TUGAS DAN FUNGSI
<i>Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan</i>	penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan serta penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan.
<i>Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan</i>	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
<i>Sub Bagian Tata Usaha</i>	melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.3 Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2023, pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berjumlah 114 (seratus empat belas) orang yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Dengan adanya penataan staf lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan adanya purna tugas pegawai, pada akhir tahun 2023 pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berjumlah 114 (seratus empat belas) orang yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, 15 (lima belas) orang tenaga PPPK dan 22 (dua puluh dua) orang PPNPN.

Komposisi jumlah dan sebaran pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.berikut.

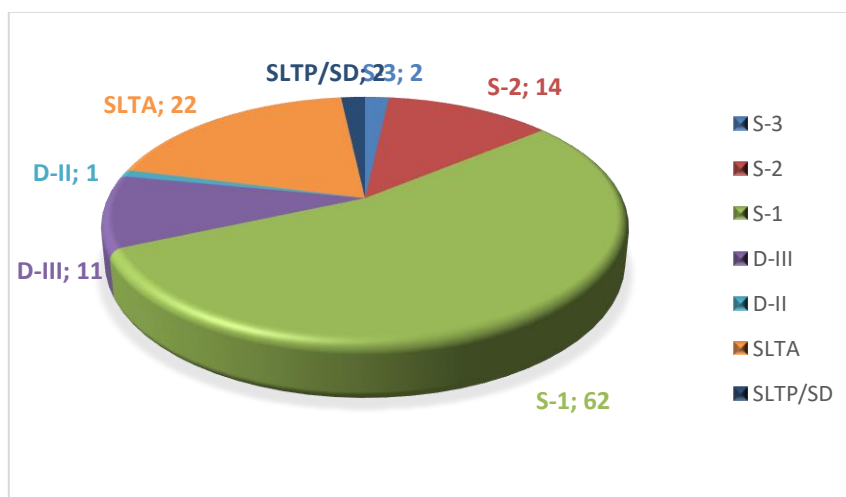
Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Keterangan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Golongan IV	14	11	
2	Golongan III	58	60	
3	Golongan II	6	5	

4	Golongan I	1	1
5	PPPK	-	15
6	PPNPN	36	22
jumlah		115	114

Tabel 3. Komposisi dan sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (orang)						Jumlah
	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA/SLTP/SD	
Direktur							
Subdit Pengukuhan Kawasan Hutan		5	32	4	1	3	45
Subdit PPFKH	2	7	6	2		1	18
Sub Bagian Tata Usaha		2	4	1		5	14
PPPK			12	3			15
PPNPN			8	1		13	22
Jumlah	2	14	62	11	1	22	114



Gambar 2. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tk. Pendidikan

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang yang dimiliki oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2021 (bergerak dan tidak bergerak) adalah senilai Rp. 6.137.408.610 (enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah). Rincian aset seperti tercantum pada Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

PERKIRAAN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER
KODE	URAIAN	NILAI (Rp)
132111	Peralatan dan Mesin	11.171.893.907
133111	Gedung dan Bangunan	11.422.000

134113	Jaringan	49.500.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.412.922.297)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.741.280)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(16.087.500)
162151	Software	3.374.864.000
162191	Aset tak berwujud lainnya	2.640.000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(1.435.000)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(2.039.725.250)
JUMLAH		6.317.408.610

1.5 Permasalahan yang sedang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah mempunyai kebijakan penyederhanaan birokrasi antara lain dengan pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan yang semula terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat disederhanakan menjadi 2 (dua) Subdirektorat. Penyederhanaan tersebut menggabungkan beberapa tugas Subdirektorat. Adanya reorganisasi tersebut memberi dampak dalam pelaksanaan kegiatan karena perlu penyesuaian dalam proses bisnis dan prosedur operasional.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sebagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 – 2024. Arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 – 2024 adalah Pilar Sosial Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan. Sedangkan Program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Untuk mewujudkannya, sasaran program yang dijabarkan dalam kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate;
2. Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan, Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020 – 2024 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijabarkan sebagai berikut :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi).
2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penataan kawasan hutan.
3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses.
4. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN.
5. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Adapun Indikator Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Target Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	0,33 Juta Hektar	12 Juta Hektar	13,49 Juta Hektar	13,49 Juta Hektar	PM
			Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul
			Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon
			Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	41,4 Ribu Ha	41,4 Ribu Ha	41,4 Ribu Ha	41,4 Ribu Ha	41,4 Ribu Ha
	Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada KH	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	72,9 Ribu Ha	184,4 Ribu Ha	94,7 Ribu Ha	728,1 Ribu Ha	787,1 Ribu Ha

2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan kehutanan terutama di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta upaya penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap salah satu sasaran **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**.

Dari sasaran program tersebut, **Indikator Kinerja Kegiatan** : (1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi); (2) Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; (3) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses; (4) Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN; (5) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Rencana Kerja Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan
		051-Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	30	Layanan
		052 - Pengendalian Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	1	Layanan
		053 - Pengelolaan database Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	1	Layanan
		054 - Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	1	Layanan

PROGRAM/ KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN
	002 - Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan
		051 - Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1	Layanan
		052 - Pengelolaan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1	Layanan
	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22	Rekomendasi Kebijakan/ Kajian
		051-Penelaahan Substansi Penetapan Kawasan Hutan	22	Provinsi
		053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	22	Layanan
		055-Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	34	Layanan
		056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1	Layanan
	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4	Rekomendasi Kebijakan/ Kajian
		051- Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	10	Ribu Hektar
		052- Pemutakhiran Data dan Peta TORA	4	Dokumen
	002- Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1	Layanan
		051-Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	41,4	Ribu Hektar
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan
		060-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1	Layanan
	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	47	unit

PROGRAM/ KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN
		051-pengadaan kendaraan bermotor	1	unit
		052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	46	unit
		971-Layanan Prasarana Internal	2	paket
		051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	2	paket

a. Rencana Kerja dan Anggaran

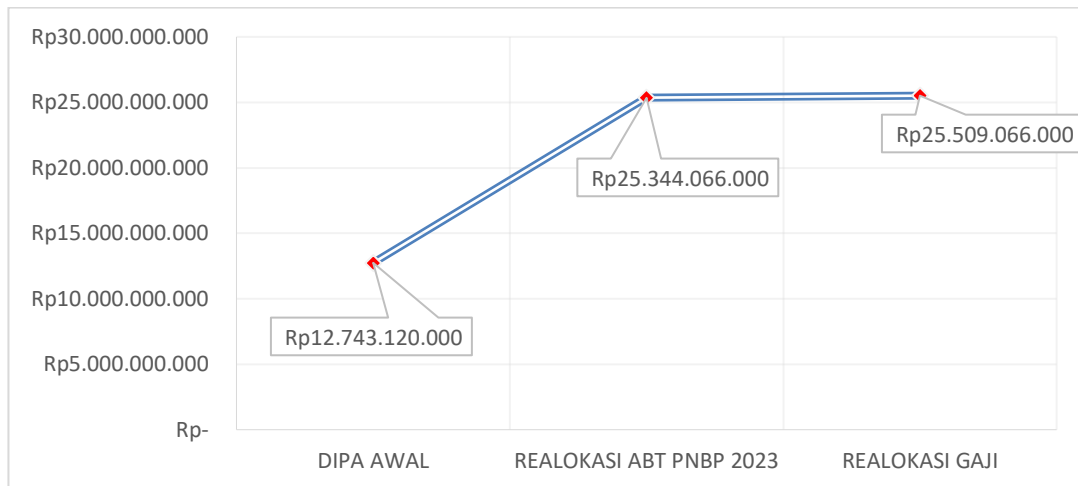
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan bagian dari Satker Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN No. DIPA-029.06.1.466100/2022 tanggal 30 November 2022, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.809.735.000,- (Tiga belas milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Alokasi anggaran Tahun 2023

Program/Kegiatan	Anggaran	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp.	21.738.237.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp.	3.770.829.000
Jumlah	Rp.	25.509.066.000

Anggaran tersebut merupakan revisi terakhir setelah penambahan Pagu Anggaran Belanja Tambahan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP Tahun 2023), yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan serta adanya penambahan anggaran akibat realokasi kelebihan gaji.

ANGGARAN 2023



Gambar 3. Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2023

Tabel 8. Alokasi anggaran per unit kegiatan

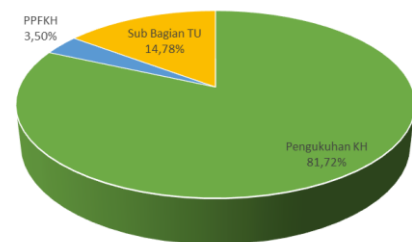
PROGRAM/ KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan					
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan	392,000,000
		051-Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	30	Layanan	320,409,000
		052 - Pengendalian Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	1	Layanan	35,591,000
		053 - Pengelolaan database Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	1	Layanan	26,555,000
		054 - Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	1	Layanan	9,445,000
	002 - Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	500,000,000
		051 - Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1	Layanan	190,000,000
		052 - Pengelolaan Dokumentasi Pengukuhan dan	1	Layanan	310,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
		Penatagunaan Kawasan Hutan			
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22	Rekomen dari Kebijakan / Kajian	11,146,237,000
		051-Penelaahan Substansi Penetapan Kawasan Hutan	22	Provinsi	5,118,852,000
		053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	22	Layanan	2,014,106,000
		055-Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	34	Layanan	2,529,260,000
		056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1	Layanan	1,484,019,000
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4	Rekomen dari Kebijakan / Kajian	9,628,000,000
		051- Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	10	Ribu Hektar	8,856,625,000
		052- Pemutakhiran Data dan Peta TORA	4	Dokumen	771,375,000
	002-Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1	Layanan	72,000,000
		051-Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	41,4	Ribu Hektar	72,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1,815,000,000
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	
		060-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1	Layanan	760,000.000
	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	47	unit	
		051-pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	494,300,000

PROGRAM/KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
		052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	46	unit	417,529,000
		971-Layanan Prasarana Internal	2	paket	
		051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	2	paket	299,000,000

Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Sub Direktorat/Bagian Lingkup
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022

Unit Kerja (subdit/Sub Bag)	Pagu Anggaran 2023 (Rp)	Persentase Anggaran (%)
Pengukuhan KH	20.846.237.000	81,72
PPFKH	892.000.000	3,50
Sub Bagian TU	3.770.829.000	14,78
JUMLAH	25.509.066.000	100,00



2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perjanjian Kinerja
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023
(Perubahan II)

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) 2. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses 4. Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN 5. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	
5433.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1. Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Seluruh permohonan pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	30 layanan
5433.BAH.001	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	30 layanan
5433.BMA	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	1 layanan
5433.BMA.001	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Penyediaan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	1 layanan
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1. SK Penetapan Kawasan hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN	27 Rekomendasi
5433.PBV.003	SK Penetapan Kawasan Hutan	SK Penetapan Kawasan hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	22 Rekomendasi
5433.PBV.004	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Rekomendasi
	Luas Kawasan Hutan yang	Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	1 Rekomendasi

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
	dilepaskan untuk IKN		
5433.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	Seluruh permohonan Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 layanan
5433.QAH.001	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	Seluruh permohonan Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 layanan
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan
5432.EBA.994.002	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran Dit. PPKH terlaksana	1 Layanan
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Dukungan Manajemen Internal terlaksana	1 Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	Layanan Umum Dit. PPKH terlaksana	1 Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Seluruh Layanan Sarana dan Prasarana Internal Dit. PPKH terlaksana	49 Unit
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Seluruh Layanan Sarana dan Prasarana Internal Dit. PPKH terlaksana	47 Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Seluruh Layanan Sarana dan Prasarana Internal Dit. PPKH terlaksana	2 Unit

2.4.Review Atas Dokumen Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan yaitu Revisi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 - 2024, Renja Ditjen PKTL tahun 2023, Revisi Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024 dan Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2022, Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan anggaran pada Indikator Kinerja Program: (1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan; dan (2) Luas kawasan hutan yang dilepaskan

untuk TORA. Selebihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 yang di Revisi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali. Pada akhir Desember 2023 anggaran yang dikelola sebesar Rp. 25.509.066.000,- (dua puluh milyar lima ratus Sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBPN.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Efektifitas} \\ \text{Capaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan $= 1$ bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja

sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan >1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan <1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kegiatan dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2023. Mengacu pada Renstra Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Renja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 maka kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2023 yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat PPKH Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan					
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	30 Layanan	100
		051-Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	30 Layanan	30 Layanan	100
		052 - Pengendalian Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	1 Layanan	1 Layanan	100

PROGRAM/ KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
		053 - Pengelolaan database Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	1 Layanan	1 Layanan	100
		054 - Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	1 Layanan	1 Layanan	100
	002 - Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	1 Layanan	100
		051 - Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 Layanan	1 Layanan	100
		052 - Pengelolaan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 Layanan	1 Layanan	100
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	22 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	100
		051-Penelaahan Substansi Penetapan Kawasan Hutan	22 Provinsi	22 Provinsi	100
		053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	22 Layanan	22 Layanan	100
		055-Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	34 Layanan	34 Layanan	100
		056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1 Layanan	1 Layanan	100
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	4 Rekomendasi Kebijakan/Kajian	100
		051- Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	10 Ribu Hektar	10 Ribu Hektar	100
		052- Pemutakhiran Data dan Peta TORA	4 Dokumen	4 Dokumen	100

PROGRAM/KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
	002-Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1 Layanan	1 Layanan	100
		051-Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	41,4 Ribu Hektar	41,4 Ribu Hektar	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
		060-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	47 Unit	47 Unit	100
		051-pengadaan kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	100
		052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	46 Unit	46 Unit	100
		971-Layanan Prasarana Internal	2 Paket	2 Paket	100
		051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	2 Paket	2 Paket	100

Tabel 12. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat PPKH Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan					
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	30 Layanan	100
	002 - Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan	30 Layanan	30 Layanan	100

	penatagunaan kawasan hutan	penatagunaan kawasan hutan			
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	22 Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	100
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4 Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	4 Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	100
	002-Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1 Layanan	1 Layanan	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	47 Unit	47 Unit	100
		971-Layanan Prasarana Internal	2 Paket	2 Paket	100

3.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2023 suatu output dengan persentase capaian kinerja tahun 2023.

Tabel 13. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	CAPAIAN (%)		EFEKTIFITAS
			2022	2023	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan					

5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	100	100	1
		051-Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	100	100	1
		052 - Pengendalian Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	100	100	1
		053 - Pengelolaan database Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	100	100	1
		054 - Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	100	100	1
	002 - Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	100	100	1
		051 - Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	100	100	1
		052 - Pengelolaan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	100	100	1
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	100	100	1
		051-Penelaahan Substansi Penetapan Kawasan Hutan	100	100	1
		053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	100	100	1
		055-Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	100	100	1
		056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	100	100	1
		004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	100	100	1
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	051- Penyelesaian Pelepasan Kawasan	100	100	1

		Hutan yang dilepaskan untuk TORA			
		052- Pemutakhiran Data dan Peta TORA	100	100	1
	002-Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	100	100	1
		051-Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	100	100	1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	100	100	1
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	100	1
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	100	100	1
		060-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	100	100	1

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 rata-rata sebesar 100% Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 % maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 100% yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya.

3.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET 2023	CAPAIAN (%)		EFISIENSI
				FISIK	KEUANGAN	%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan						
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	100	99,3	1,01
		051-Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan	30 Layanan	100	99,78	1,00

	Fungsi Kawasan Hutan				
	052 - Pengendalian Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	1 Layanan	100	95,93	1,04
	053 - Pengelolaan database Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	1 Layanan	100	97,8	1,02
	054 - Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	1 Layanan	100	99,98	1,00
002 - Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	100	99,84	1,00
	051 - Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 Layanan	100	99,97	1,00
	052 - Pengelolaan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 Layanan	100	99,76	1,00
PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan /Kajian	100	99,76	1,00
	051-Penelaahan Substansi Penetapan Kawasan Hutan	22 Provinsi	100	99,9	1,00
	053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	22 Layanan	100	99,88	1,00
	055-Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	34 Layanan	100	99,73	1,00
	056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1 Layanan	100	99,18	1,01

	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4 Rekomendasi Kebijakan /Kajian	100	99,51	1,00
		051- Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	10 Ribu Hektar	100	99,48	1,01
		052- Pemutakhiran Data dan Peta TORA	4 Dokumen	100	99,87	1,00
	002- Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1 Layanan	100	99,52	1,00
		051-Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	41,4 Ribu Hektar	100	99,52	1,00
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	100	99,88	1,00
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	100	99,88	1,00
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	100	99,69	1,00
		060-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1 Layanan	100	99,69	1,00
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	47 Unit	100	99,97	1,00
		051-pengadaan kendaraan bermotor	1 Unit	100	100	1,00
		052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	46 Unit	100	99,93	1,00
		971-Layanan Prasarana Internal	2 Paket	100	99,59	1,00
		051- Pembangunan/Re novasi Gedung dan Bangunan	2 Paket	100	99,59	1,00
CAPAIAN EFISIENSI (%)				100	99,67	1,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan rata-rata > 1 bermakna pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Hal ini berarti bahwa capaian fisik lebih besar dibandingkan capaian realisasi keuangan dan menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian output.

3.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Secara umum pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel 15. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/RO	Target 5 Tahun	Satuan	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)				Total Realisasi s.d. Thn Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
				2020	2021	2022	2023		
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
Terselaikann ya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	001-Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	37,65	Juta Ha	0,33	14,9	6,5	6,5	28,23	74,98
	002 - Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	5	Judul	1	1	1	1	4	80
Terselaikann ya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.	001-Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	240	Pemohon	48	30	30	98	206	85,83
	002-Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	41,4	Ribu Ha	41,4	41,4	36,15	36,37	36,37	87,85
Terselaikann ya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	001 - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.867,20	Ribu Ha	72,9	184,73	113,6	173,91	545,14	29,20
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL								
	094-Layanan Perkantoran	5	Layanan	1	1	1	1	4	80
	962-Layanan Dukungan	5	Layanan	1	1	1	1	4	80

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

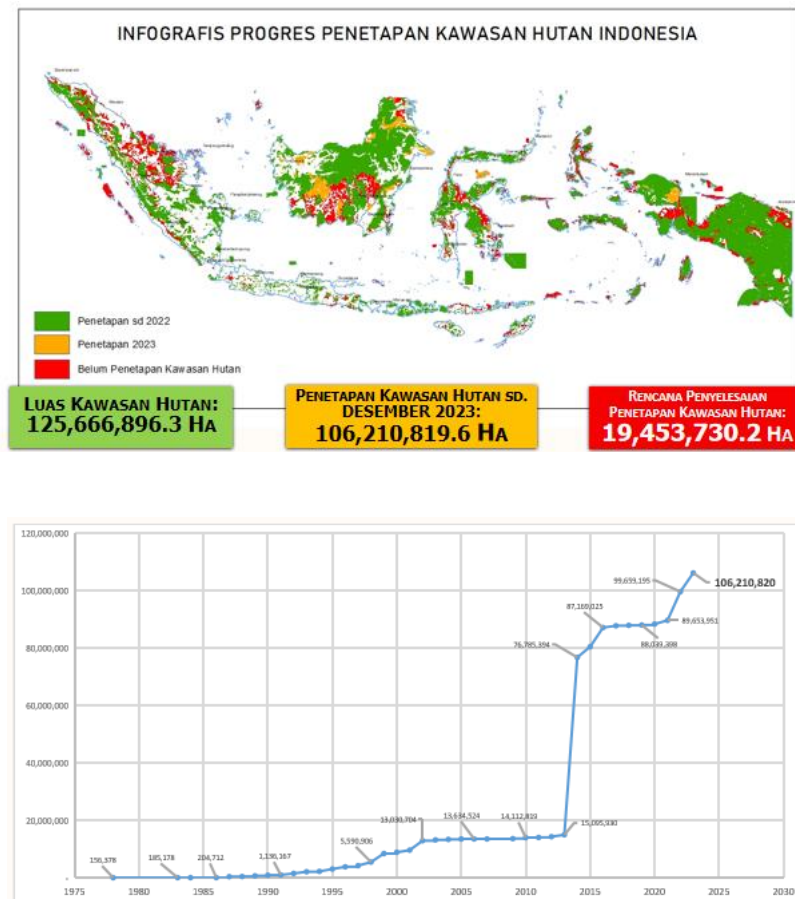
Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), hampir seluruh kegiatan rinci tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 % termasuk kawasan konservasi)

Penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan hutan saat ini adalah adanya tuntutan akan kepastian kawasan hutan dan kepastian legalitas aset pihak ketiga sehingga pengukuhan kawasan hutan menjadi program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejalan dengan pentingnya percepatan Pengukuhan/Penetapan Kawasan Hutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa "Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini". Maka dengan adanya mandat tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyelesaikan penetapan kawasan paling lama pada Tahun 2023.

Kawasan hutan di Indonesia saat ini memiliki luas $\pm$ 125.664.550 Ha, data penetapan kawasan hutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 total 2.327 unit seluas 99.659.196 ha. Pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 183 unit seluas 6.551.624 ha, sehingga jumlah total unit dan luas penetapan kawasan hutan sampai dengan Desember 2023 adalah 2.510 unit seluas 106.210.819 ha.



Gambar 4. Infografis Progress Penetapan Kawasan Hutan di Indonesia

Berdasarkan revisi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 – 2024 dan Revisi Rencana Startegis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 – 2024, target terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu seluas 26,1 Juta Ha.

Secara umum, pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh BPKHTL baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Hal

tersebut yang salah satunya menyebabkan target penetapan Kawasan hutan tahun 2023 belum dapat tercapai seluruhnya.

Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Pada tahun 2023 terdapat target tata batas kawasan hutan sepanjang 44.739,85 Km dengan potensi penetapan Kawasan hutan seluas 15.996.282,75 Ha. Dari target tersebut berdasarkan data yang masuk sampai dengan 30 desember 2023 dapat direalisasikan penataan batas sepanjang 38.184,75 Km dengan potensi penetapan Kawasan hutan seluas 13.236.633,75 Ha. Hasil penataan batas tahun 2023 yang dokumen Berita Acara Tata Batasnya belum disampaikan ke Pusat akan ditetapkan pada 2024.

Beberapa hal yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian target penetapan adalah sebagai berikut:

a. Launching Penetapan Kawasan Hutan

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Dalam mendukung hal tersebut, percepatan pengukuhan kawasan hutan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional dalam rangka program pemerataan ekonomi.

Pada Hari Senin 30 Januari 2023 dilaksanakan Launching Penyelesaian Tata Batas Menuju Penetapan Kawasan Hutan 100% Tahun 2023 oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan secara virtual maupun faktual dan mengundang Para Gubernur/Bupati/Walikota, K/L, Kepala Dinas yang membidangi kehutanan tingkat provinsi, dan Pejabat Eselon I, II lingkup KLHK.





Gambar 4. Kegiatan Launching Tata Batas Menuju Penetapan Kawasan Hutan 100%

b. Rapat Konsinyering

Rapat konsinyering dilakukan untuk mengetahui basis data termutakhir terkait batas kawasan hutan sekaligus pencermatan kembali panjang batas kawasan hutan baik sudah ditetapkan maupun sedang dilakukan tata batas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui target dan capaian penetapan kawasan hutan yang belum ditetapkan. Pada Hari Senin - Selasa tanggal 12-13 Juni 2023 telah dilaksanakan Konsinyering Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan Tahun 2023 yang dihadiri oleh perwakilan BPKTHL I - XXII dan beberapa K/L terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian ATR/BPN. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat mewujudkan kegiatan pengukuhan dan penetapan kawasan hutan 100% serta kegiatan tata batas segera selesai.



Gambar 5. Kegiatan Konsinyering dan Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan Tahun 2023

c. Satu Jaga Satu (SJS)

Satu Jaga Satu (SJS) merupakan salah satu kegiatan monitoring dan penyusunan basis data tentang proses tata batas hingga penetapan kawasan hutan terhadap proses pengukuhan kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait, dalam hal ini adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Untuk memudahkan proses kegiatan monitoring dan penyusunan basis data, maka dibentuklah Tim Desk Percepatan Penyelesaian Prioritas Nasional Kegiatan Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2023 yang disusun dalam Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor PT.5/PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023 tanggal 5 Maret 2023.

Pegawai lingkup Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan dari Pokja Wilayah bersama-sama dengan pegawai dari BPKHTL menjadi tim kecil untuk melakukan monitoring tata batas pada setiap periodik. Kemudian hasil monitoring disampaikan kepada koordinator tim dan kemudian dipaparkan kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk dilakukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut.

d. Pengadaan Tenaga Ahli

Pengadaan Tenaga Ahli Pengukuhan Kawasan Hutan (TA PDP) dikhususkan untuk membantu dan mendukung kegiatan penatapan kawasan hutan. TA PDP diwajibkan memiliki kemampuan di bidang GIS yang mahir untuk membantu menelaah BATB dan penelaahan dalam

penyusunan Draft SK dan Peta Penetapan Kawasan Hutan sebagai usaha percepatan penetapan kawasan hutan yang sesuai dengan target. BATB yang telah dikerjakan oleh TA PDP kemudian di supervisi oleh pegawai yang berada di Pokja Wilayah. Hasil telaah BATB oleh Tenaga Ahli Pengukuhan Kawasan Hutan. Adanya TA PDP dapat membantu terselesaikannya sebanyak 333 BATB baik dari tahun 2023 maupun sebelumnya. Sebanyak 16.739,15 km panjang koreksi BATB telah ditelaah dan sudah diajukan dengan tahap pengesahan SK Penetapan Kawasan Hutan.

Pencapaian kinerja penetapan Kawasan hutan tahun 2023, terdapat sebanyak 183 SK Penetapan Kawasan Hutan sampai dengan Desember 2023. Provinsi dengan luasan penetapan paling besar adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang paling kecil adalah Provinsi Bali. Secara detil dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Jumlah SK berdasarkan Provinsi pada Penetapan 2023

Provinsi	Jumlah SK	Luas SK (Ha)
Bali	1	3,37
Banten	1	720,43
Jambi	1	4.805,63
Jawa Barat	4	415,27
Jawa Tengah	5	139,89
Jawa Timur	2	976,26
Kalimantan Barat	12	300.011,42
Kalimantan Selatan	5	266.586,62
Kalimantan Tengah	10	1.747.018,39
Kalimantan Timur	28	750.632,38
Kalimantan Utara	11	875.751,34
Kep. Riau	8	25.949,80
Kepulauan Bangka Belitung	1	480,63
Lampung	1	9.714,35
Nusa Tenggara Timur	12	1.174,00
Papua	2	92.305,38
Papua Barat	4	1.313.899,04
Papua Barat Daya	5	50.258,86
Riau	38	475.216,25
Sulawesi Barat	4	49.088,98
Sulawesi Tengah	2	338.383,70
Sulawesi Tenggara	2	112.078,46
Sulawesi Utara	3	536,34
Sumatera Barat	4	13.980,28
Sumatera Selatan	3	3.975,97
Sumatera Utara	14	117.521,10
Grand Total	183	6.551.624,14

Capaian penetapan kawasan hutan pada tahun 2023 tidak lepas dari dukungan dengan adanya Tenaga Ahli Penelaahan Data Pengukuhan (TA PDP) untuk membantu tercapainya target penetapan kawasan hutan. Capaian penetapan kawasan hutan sampai dengan bulan Desember 2023 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kawasan hutan seluruh Indonesia Tahun 2023 dari target di dalam Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seluas 26,1 juta Ha, yang terealisasi adalah seluas 6.551.624 Ha dengan jumlah SK sebanyak 183 SK, sehingga secara total luas kawasan hutan yang telah ditetapkan sampai dengan Desember 2023 seluas 106.210.819,6 Ha sebanyak 2.510 SK;
2. Rincian Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan Hutan Januari sampai dengan Desember 2023 adalah sebagai berikut pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Rincinan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan Hutan

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
1	Bali	SK.3541/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023	28/03/2023	HL Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19)	3,37
2	Banten			TWAL Pulau Sangiang	720,43
3	Jambi	SK.13301/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPK Batang Ule	4.805,63
4	Jawa Barat	SK.3536/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023	28/03/2023	HL Kelompok Hutan Gunung Tilugeder	8,57
5	Jawa Barat	SK.3542/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023	28/03/2023	Perluasan KH Gunung Galunggung	19,86
6	Jawa Barat	SK.7618/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/7/2023	20/07/2023	HPT Pasir Cisujen, Lakom an. PT. Bumi Suksesindo	54,81
7	Jawa Barat			HP Purwakarta I dan II	332,03
8	Jawa Tengah	SK.3537/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023	28/03/2023	Bagian Hutan Bumijawa Lakom PT Indonesia Power	4,15
9	Jawa Tengah	SK.4707/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/4/2023	5 April 2023	Bagian Hutan Bumijawa Lakom PT Geo Dipa Energi	4,94
10	Jawa Tengah	SK.5013/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/5/2023	02/05/2023	TWA Sumber Semen	1,92
11	Jawa Tengah	SK.7503/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	14/07/2023	HP Bagian Hutan Bumijawa Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi an. PT. Semen Grobogan	64,65
12	Jawa Tengah	SK.7836/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HP dari Lahan Pengganti Dalam Rangka TMKH Otorita Borobudur	64,24
13	Jawa Timur	SK.3648/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023	10/03/2023	HP Bagian Hutan Boyolangu II	6,38
14	Jawa Timur	SK.5245/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/5/2023	15/05/2023	CA Pulau Sempu	969,88
15	Kalimantan Barat	SK.11217/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/10/2023	16/10/2023	HPK Sungai Raya	820,90
16	Kalimantan Barat	SK.11218/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/10/2023	16/10/2023	HPT Gunung Padang Sepango - Gunung Selees - Sungai Behe	1.375,46
17	Kalimantan Barat	SK.12528/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/11/2023	14/11/2023	HP Bukit Condong	14.129,14

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
18	Kalimantan Barat	SK.13288/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL dan HP G. Belakang; HL G. Gamarabak; HL G. Raya	50.754,59
19	Kalimantan Barat	SK.13290/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Pejapa dan HP S. Beduai - S. Dangin	12.647,02
20	Kalimantan Barat	SK.13363/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL. Bukit Baya; HL dan HPK G. Keuhuma	72.399,79
21	Kalimantan Barat	SK.7621/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	20/07/2023	HPK Sungai Kumba	21.653,96
22	Kalimantan Barat			Kawasan Hutan Lindung Pulau Betingan dan Pulau Dua	153,24
23	Kalimantan Barat			HL S. Landak, HP S. Ambawang, HP S. Ambawang (S. Sabi)	6.040,53
24	Kalimantan Barat			HL. P Berembang; HL P. Panjang III; HL P. Periling; HL P. Tiga; HPT S. Radak; HL Simpang Cabe; HL S. Padu Ampat	11.765,40
25	Kalimantan Barat			Kawasan Hutan Lindung Danau Sentarum	18.291,19
26	Kalimantan Barat			HL Belimbing (G.Leya), HPT G. Kenebah-S.Keninjal, HP Keninjal, HPK Lubuk Bintang (S.Beluwai)	89.980,20
27	Kalimantan Selatan	SK.12715/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/11/2023	17/11/2023	HPT, HP, dan HPK di Kabupaten Tanah Bumbu	28.278,19
28	Kalimantan Selatan	SK.13285/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL, HPT, HP, HPK Tanah Laut	48.170,18
29	Kalimantan Selatan	SK.7834/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	28/07/2023	HL Gunung Batu Panggung, HPT Pengaron, HP Banjar dan HPK Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tapin	81.125,89
30	Kalimantan Selatan			SM Kuala Lupak, SM Pulau Kaget, TWA Pulau Kembang, TWA Pulau Bakut	3.713,49
31	Kalimantan Selatan			Sebagian Kawasan HL, HP, HPK di Kabupaten Kotabaru	105.298,87
32	Kalimantan Tengah	SK.12526/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/11/2023	14/11/2023	HP Sungai Katingan	1.129,60
33	Kalimantan Tengah	SK.12527/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/11/2023	14/11/2023	HP Sungai Barito	50.378,16
34	Kalimantan Tengah	SK.12711/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/11/2023	17/11/2023	HL Bukit Belawan - Sungai Puan	11.117,32
35	Kalimantan Tengah	SK.13366/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT Sungai Mentaya Kabupaten Kotim dan Seruyan	337.847,26
36	Kalimantan Tengah	SK.13368/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	TN BBBR-HL,HPT,HP Sungai Salau dan Sebagian HPK Sungai MenTaya	1.315.382,58
37	Kalimantan Tengah	SK.7864/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HL Sungai Mendawai	3.856,92
38	Kalimantan Tengah	SK.7886/MENLHK/PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPK Sungai Manjul - Sungai Salau	6.637,89
39	Kalimantan Tengah			HP Runtu Kobar	4.676,20
40	Kalimantan Tengah			HL Sungai Mentaya	5.640,54
41	Kalimantan Tengah			HP S. Seruyan	10.351,92

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
42	Kalimantan Timur	SK.10686/Menlhk-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2022	30/12/2022	HPT Sungai Namuk	118,24
43	Kalimantan Timur	SK.12524/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/11/2023	14/11/2023	HPK Barat Sungai Mahakam-Hulu Sungai Tebalai	1.139,75
44	Kalimantan Timur	SK.12525/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/11/2023	14/11/2023	HPK Pulau Jawang	90,20
45	Kalimantan Timur	SK.13360/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HP P Timbang Burukang dan P Muara Ulu S Batang Banyumati Kabupaten Kukar	5.599,20
46	Kalimantan Timur	SK.2436/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023	16/03/2023	HPT Hulu Sungai Ngoho	49.628,45
47	Kalimantan Timur	SK.3540/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023	28/03/2023	HPK Sungai Siram	2.115,86
48	Kalimantan Timur	SK.6069/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/6/2023	20/06/2023	HPT Sungai Kawisik - Hulu Sungai Lempake dan HPK Sungai Kawisik - Sungai Yaba - Dumaring Kab Berau	8.481,32
49	Kalimantan Timur	SK.7391/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	11/07/2023	HPT Barat Sungai Sebulu - Hilir Muara Kaman	12.374,25
50	Kalimantan Timur	SK.7832/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	28/07/2023	HPT dan HPK Sungai Lempake	1.035,82
51	Kalimantan Timur	SK.7833/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	28/07/2023	HPT Sungai Jele - Sungai Lembak - Sungai Bengalon dan HPK Sungai Bengalon	35.766,76
52	Kalimantan Timur	SK.7835/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPT Pegunungan Mangkalat - Pegunungan Medadem	255.279,77
53	Kalimantan Timur	SK.7843/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPT Muara Sungai Bui	175,74
54	Kalimantan Timur	SK.7846/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	TWA dan TWAL Pulau Sangalaki	280,07
55	Kalimantan Timur	SK.7855/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPT Sungai Dua dan HPK Sungai Dua, Sungai Tehem - Tehem, Barat Tembudan - Muara Sungai Bangun	1.879,51
56	Kalimantan Timur	SK.7867/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	SM dan SML Pulau Semama	220,14
57	Kalimantan Timur	SK.7883/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPT Sungai Tabalar dan HPK Muara Tabalar	2.048,26
58	Kalimantan Timur	SK.7884/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPT Sungai Tamiang - Sungai Mengkudu - Hulu Sungai Tamiang dan HPK Sungai Kerang - Sungai Balu - Sungai Mengkudu	12.210,57
59	Kalimantan Timur	SK.7885/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPT Sungai Sepaku - Sungai Riko - Sungai Telake - Sungai Kendilo dan HPK Sungai Sepaku - Sungai Telake - Hulu Sungai Serabi - Sungai Kuaro	259.490,74
60	Kalimantan Timur	SK.13286/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sungai Lawa	2.282,00
61	Kalimantan Timur			HP Lempake	295,86
62	Kalimantan Timur			Sungai Bolongan	649,46
63	Kalimantan Timur			Sungai Semai	749,91
64	Kalimantan Timur			Gunung Hantu II	1.393,69
65	Kalimantan Timur			HP Barat Muara Kaeli	8.857,39
66	Kalimantan Timur			Sungai Tasili - Sungai Manubar - Sungai Menamut - Sungai Yungkas	12.667,06
67	Kalimantan Timur			Gunung Hantu I	13.412,60
68	Kalimantan Timur			Sungai Bengalon	17.716,02

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
69	Kalimantan Timur			Sungai Keraitan - Mengapoh ; Sungai Keraitan - Sungai Pengadan - Sungai Samatutung ; HPK Pengadan - Sungai Semina - Sungai Bengalon	44.673,74
70	Kalimantan Utara	SK.11219/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/10/2023	16/10/2023	HPT dan HP Sungai Kayan - Sungai Bahau	433.209,92
71	Kalimantan Utara	SK.13275/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT dan HP Keburau-Sungai Binai	156.454,44
72	Kalimantan Utara	SK.13365/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT Sungai Kayan-Sungai Sesayap, HPK Sungai Sekatak, HPK Hulu Sungai Betayu	182.617,03
73	Kalimantan Utara	SK.7441/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	26/07/2023	HPK Sungai Bintani	3.080,13
74	Kalimantan Utara	SK.7603/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	18/07/2023	HPK Sungai Malinau - Sungai Tibu	1.283,32
75	Kalimantan Utara	SK.7776/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	27/07/2023	HPK Sungai Mentarang	1.428,07
76	Kalimantan Utara	SK.7842/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPT Sungai Binai	31.442,46
77	Kalimantan Utara	SK.7853/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPK Sungai Mara - Sungai Keburau	710,01
78	Kalimantan Utara	SK.7890/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HPK Sungai Sesayap - Sungai Betayu	4.707,64
79	Kalimantan Utara			HP Hilir Sungai Sebu - Sungai Sembakung	10.063,16
80	Kalimantan Utara			HP Sungai Agison - Sungai Sembakung	50.755,16
81	Kep. Riau	SK.11215/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/10/2023	16/10/2023	HPK Pulau Sentut	2,31
82	Kep. Riau	SK.11216/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/10/2023	16/10/2023	Taman Buru Rempang Blok I dan Rempang Blok II	2.650,28
83	Kep. Riau	SK.13276/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kelompok Hutan Pulau Galang - Pulau Galang Baru	1.478,02
84	Kep. Riau	SK.13279/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kelompok Hutan Pulau Gunung Papan - Pulau Kundur - Pulau Durai dan sekitarnya	9.105,84
85	Kep. Riau	SK.13280/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kelompok Hutan Pulau Citlim - Pulau Combol - Pulau Sugi Bawah dan sekitarnya	6.161,32
86	Kep. Riau	SK.13281/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kelompok Hutan Pulau Karimun Besar - Pulau Asam - Pulau Merak dan sekitarnya	1.251,64
87	Kep. Riau	SK.13282/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kelompok Hutan Lindung Pulau Rempang	4.399,57
88	Kep. Riau	SK.13294/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	TWA Muka Kuning I dan TWA Muka Kuning II	900,82
89	Kepulauan Bangka Belitung	SK.13304/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPK Pantai Sijuk	480,63
90	Lampung	SK.13283/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HP Giham Tahmi	9.714,35
91	Nusa Tenggara Timur	SK.13357/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	KH Daiama 2	13,44
92	Nusa Tenggara Timur	SK.13358/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Manamolo	15,20

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
93	Nusa Tenggara Timur	SK.13359/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Nusamanuk	58,66
94	Nusa Tenggara Timur	SK.5354/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/5/2023	24/05/2023	HPT Oenutnanan	34,89
95	Nusa Tenggara Timur	SK.7318/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	11/07/2023	HPT Sambet	37,14
96	Nusa Tenggara Timur	SK.7361/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	10/07/2023	HL Lununianam	104,20
97	Nusa Tenggara Timur	SK.7854/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HL Daiama 1	16,42
98	Nusa Tenggara Timur	SK.7863/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2023	31/07/2023	HL Landu Tii	18,14
99	Nusa Tenggara Timur	SK.8259/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/8/2023	22/08/2023	HL Mangrove Bolatena Lifuleo	253,70
100	Nusa Tenggara Timur			HL Natu (RTK.116)	23,47
101	Nusa Tenggara Timur			HL Oetefu	229,28
102	Nusa Tenggara Timur			HL Bestobe	369,46
103	Papua			HL Butuo, HPT Sungai Seiwa dan HPK Sungai Daiwa	13.195,71
104	Papua			Cagar Alam Yapen Tengah	79.109,67
105	Papua Barat	SK.13309/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT DAS Indam Pulau Namatota	2.293,89
106	Papua Barat	SK.13310/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Kambala	3.636,02
107	Papua Barat	SK.13331/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Muturi Dua_DAS Jakati_DAS Naramasa	619.870,50
108	Papua Barat			DAS Bomberay-Kasuri-Wagura	688.098,63
109	Papua Barat Daya	SK.13305/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Pulau Lugo, HL Pulau Yef Bie, HL Pulau Pan dan HL Pulau Pele	369,07
110	Papua Barat Daya	SK.13306/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Kepulauan Simsimkuni	168,29
111	Papua Barat Daya	SK.13307/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Pulau Tolesi, Pulau Folesi, Pulau Yefkapal, Pulau Karabaik, Pulau Saplap Pele dan Pulau Saplap Ganan	547,54
112	Papua Barat Daya	SK.13308/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Kepulauan Kamomyel Dan Hutan Lindung Pulau Salutun	335,88
113	Papua Barat Daya	SK.13330/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kelompok Hutan DAS Karabra-Ayamuru	48.838,08
114	Riau	SK.13277/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPK Sungai Enau	2.198,27
115	Riau	SK.13278/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPK Batang Tiu	3.128,20

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
116	Riau	SK.13295/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT Sungai Keriting - Sungai Gangsal Blok I	1.290,81
117	Riau	SK.13298/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT P. Menggung dan HPT P. Topang	198,70
118	Riau	SK.13299/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	SM Giam Siak Kecil	78.469,76
119	Riau	SK.13300/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT Sungai Kembung Blok I, HPT Sungai Kembung Blok II, HPT Sungai Kembung Blok III, HPT Sungai Kembung Dalam Blok III, HPT Sungai Kembung Dalam Blok IV, dan HP Sungai Kembung Dalam	8.800,88
120	Riau	SK.13303/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT P. Halang I, HPT P. Halang II, HPT Sinaboi I, dan HPT Sinaboi II	4.668,75
121	Riau	SK.13332/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan HL Tanjung Bahagia dan Kawasan HPK Sungai Ular	463,35
122	Riau	SK.13333/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tanjung Leban	960,28
123	Riau	SK.13334/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan HPT Pulau Rampang, HPT Pulau Mampu, HPT Pulau Payung I, HPT Pulau Payung II, HPT Pulau Atung, HPT Sungai Gunap, HPT Sungai Buluala, HPT Sungai Melintang Blok III, HPT Sungai Melintang Blok IV, HPT Sungai Melintang Blok VHPT Pulau Mentele, dan HPT Pulau Baru	1.902,17
124	Riau	SK.13335/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Gaung Anak Serka	13.601,31
125	Riau	SK.13337/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Selari Blok I, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Selari Blok II, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sejansejgat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Muara Sungai Siak Kecil, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tanjung Labu	739,55
126	Riau	SK.13338/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Buruk Bakul	906,91
127	Riau	SK.13339/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan HPT S. Kerapung	759,86
128	Riau	SK.13340/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan HL Pulau Simpur, HL Pulau Kemuting, HL Pulau Beting Aceh, HPT Pulau Babi HPT Sungai Teluk Rhu, HPT Pulau Beruk, HPT Pulau Teguh, dan HPT Pulau Pajak	813,34
129	Riau	SK.13341/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPT S. Cina Tanjung Motong Blok I dan II dan Sebagian Kawasan HPT P. Setahun - S, Galang dan Seberang	1.257,62
130	Riau	SK.13342/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Terbatas Pulau Burung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Mengkake Blok I, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Mengkake Blok II	1.298,73
131	Riau	SK.13343/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan HPT Sungai Paloh - Sungai Tokang Blok I dan Kawasan	1.905,76

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
				HPT Sungai Paloh - Sungai Tokang Blok II	
132	Riau	SK.13344/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Tuaka – Sungai Gaung Blok VII, Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Tuaka – Sungai Gaung VIII, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Tuaka – Sungai Gaung IX, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Tuaka – Sungai Gaung X; Kawasan Hutan Produksi Tetap Batang Tuaka – Sungai Gaung Blok IX, dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Batang Tuaka	1.505,63
133	Riau	SK.13346/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian HPT S. Akar - S. Bernas; HPT. S. Labu-S. Dakal S. Meraut Besar Blok I; HPT. S. Labu-S. Dakal S. Meraut Besar Blok II; HPT. S. Labu-S. Dakal S. Meraut Besar Blok III; HPT. S. Labu-S. Dakal S. Meraut Besar Blok IV	2.886,91
134	Riau	SK.13347/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tanjung Medan	1.011,93
135	Riau	SK.13348/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Lindung Bagan Batu, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mahato Kanan, Kawasan Hutan Produksi Tetap Bagan Batu, Kawasan Hutan Produksi Tetap Mahato Kanan, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Napangga	41.099,49
136	Riau	SK.13350/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelemantan Blok I	442,47
137	Riau	SK.13351/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Tuaka - Sungai Gaung Blok I, Blok II, Blok III, Blok IV, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Pulau Cawan Blok I, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sei Mandah, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Bantaian, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Batang Tumu, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Pelanduk, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Batang Tumu	21.478,78
138	Riau	SK.13353/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Lindung (HL) Bandar Baru; Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) S. Belekop Blok I, II; HPT Kuala Merbau Blok I, II; HPT Melibur Blok I, II; HPT Meranti Bunting; Hpt S.Asam – S. Kengkam; HPT S. Cina Tanjung Motong; Hpt S.Kasap; HPT S. Perumbi Blok I; HPT S. Terus – S. Semukut; Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Kuala Merbau; HP Pulau Merbau; Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Kuala Merbau; HPK Pulau Merbau	13.749,53
139	Riau	SK.13354/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Bukit Permanisan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sei Pialan, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Permanisan	7.190,88

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
140	Riau	SK.13355/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Penekat Blok I, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Penekat Blok II, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Penekat Blok III, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Langkat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Muara Sungai Belat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Mungkal Blok II, dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Muara Sungai Belat - Sungai Mungkal	2.648,52
141	Riau	SK.13356/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Lindung S. Rokan VII, Kawasan Hutan Lindung S. Rokan VIII, Kawasan Hutan Lindung S. Rokan XIX, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bagan Siapi-Api, Kawasan Hutan Terbatas S. Mampu – S. Teras, Kawasan Hutan Produksi Terbatas S. Tambuan I, Kawasan Hutan Produksi Terbatas S. Tambuan II, Kawasan Hutan Produksi Tetap Bagan Siapi - Api – Ujung Tanjung, Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi S. Masjid - S. Dumai, dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi S. Bangko – S. Rokan	211.083,17
142	Riau	SK.7112/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HPT Sei Mandah	5.680,03
143	Riau	SK.7113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HPT kelompok hutan Pulau Bengkalis	5.711,42
144	Riau	SK.7119/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HL Pulau Mendol II	56,22
145	Riau	SK.7120/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HP Sinembah dan Rangau Blok I	31.029,55
146	Riau	SK.7121/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HPT Sungai Lakar Blok II	182,01
147	Riau	SK.7122/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HPT Sungai Apung	772,66
148	Riau	SK.7123/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HPT Selat Tugau	236,72
149	Riau	SK.7124/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HL Pulau Muda	2.252,66
150	Riau	SK.7125/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HPT Sungai Nyiur Blok III	2.514,42
151	Riau	SK.7126/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	10/10/2018	HL Pulau Mendol Blok I	319,00
152	Sulawesi Barat	SK.13404/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Kelompok Hutan Sungai Lumu	3.889,66
153	Sulawesi Barat	SK.13405/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Mamasa	30.707,27
154	Sulawesi Barat	SK.13406/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Polewali dan Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Tallu Banua	13.506,05
155	Sulawesi Barat	SK.13407/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Suaka Alam/Kawasan Hutan Pelestarian Alam Kunyi	986,00

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
156	Sulawesi Tengah	SK.13403/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean Bagian Perairan	338.206,46
157	Sulawesi Tengah	SK.13364/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Pulau Kabetan	177,24
158	Sulawesi Tenggara	SK.13402/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	KAWASAN HUTAN TAMAN WISATA ALAM LAUT KEPULAUAN PADAMARANG	39.374,17
159	Sulawesi Tenggara			TWA Teluk Lasolo	72.704,29
160	Sulawesi Utara	SK.13289/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL. P. Tamperong, HL P. Tamperong Kecil, HL. Pulau Napomanuk, HL. P. Resaan Talabe	203,07
161	Sulawesi Utara			HL Pulau Paniki, Pulau Paniki Kecil dan Pulau Mandar (I,II,III,IV)	90,15
162	Sulawesi Utara			HL Tanjung Kerak (Bobogong) I, II & III dan Hutan Lindung Pulau Hogouw	243,12
163	Sumatera Barat	SK.11213/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/10/2023	16/10/2023	HPT Pulau Niau dan Pulau Sibaru-baru	376,50
164	Sumatera Barat	SK.13292/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Kampar Kanan dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kampar Kanan	8.787,43
165	Sumatera Barat	SK.13293/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sangir	2.256,62
166	Sumatera Barat	SK.13296/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sijunjung Selatan	2.559,73
167	Sumatera Selatan	SK.13336/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Semangus	3.535,12
168	Sumatera Selatan	SK.13345/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HPK Sembilang	75,53
169	Sumatera Selatan	SK.13352/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan HL Meranti Sungai Jernih dan HP Meranti Sungai Merah	365,32
170	Sumatera Utara	SK.11214/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/10/2023	16/10/2023	HL Pulau Simuk	1.911,76
171	Sumatera Utara	SK.13264/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Barumon dan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Barumon Sosa	8.057,67
172	Sumatera Utara	SK.13265/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibuatan Dan Sebagian Kawasan Hutan Terbatas Sibuatan	5.867,72
173	Sumatera Utara	SK.13266/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Singkuang Batang Kunkun dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Singkuang Batang Kunkun	8.556,38
174	Sumatera Utara	SK.13267/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibuatan Dan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Dairi	3.530,49
175	Sumatera Utara	SK.13268/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Tetap Dolok Saut	2.230,39
176	Sumatera Utara	SK.13269/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Merapi	9.217,17
177	Sumatera Utara	SK.13270/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Siondop dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Singkuang Batang Kunkun	3.307,87

No	Provinsi	Nomor SK	Tanggal SK	Kelompok Hutan	Luas SK
178	Sumatera Utara	SK.13271/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Lubuk Raya	4.364,99
179	Sumatera Utara	SK.13272/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Sikulaping	1.280,42
180	Sumatera Utara	SK.13273/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Kawasan Hutan Produksi Tetap Batu Gajah	932,63
181	Sumatera Utara	SK.13291/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Batang Toru	14.120,82
182	Sumatera Utara	SK.13302/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	HL Batang Toru	27.027,48
183	Sumatera Utara	SK.13349/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2023	22/12/2023	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Barumon Sosa - Angkola	27.115,31
TOTAL			183		6.551.624,14

Berikut table rekapitulasi penetapan Kawasan hutan seluruh Indonesia sd tahun 2023 sebesar 84%

PROVINSI	LUAS KH INDONESIA	TAP 2023	TAP SD 2023	SISA TAP
Aceh	3.550.390	-	2.504.127	1.046.263
Bali	130.686	3	137.431	
Bangka Belitung	643.615	481	622.908	20.707
Banten**	253.254	720	203.148	50.106
Bengkulu	922.291	-	714.652	207.639
DI. Yogyakarta	16.820	-	8.861	7.959
DKI Jakarta	108.475	-	107.856	619
Gorontalo	824.668	-	812.009	12.659
Jambi	2.098.535	4.806	2.317.408	
Jawa Barat**	816.603	415	953.762	
Jawa Tengah	757.250	140	802.172	
Jawa Timur	1.361.146	976	1.060.765	300.381
Kalimantan Barat	8.388.072	300.011	7.942.630	445.442
Kalimantan Selatan	1.753.912	266.587	1.827.441	
Kalimantan Tengah	12.719.707	1.747.018	8.522.372	4.197.335
Kaltim dan Kaltara*	13.831.725	1.626.384	14.439.191	
Kep. Riau	381.832	25.950	130.056	251.777
Lampung	1.004.735	9.714	894.997	109.738
Maluku	3.919.617	-	2.730.738	1.188.879
Maluku Utara	2.515.220	-	1.433.667	1.081.553
Nusa Tenggara Barat	1.046.959	-	1.187.581	
Nusa Tenggara Timur	1.742.399	1.174	1.050.084	692.329
Papua	30.387.499	92.305	26.752.754	3.634.745
Papua Barat	9.713.137	1.364.158	9.513.156	199.981

Riau	5.406.992	475.216	2.704.011	2.702.981
Sulawesi Barat	1.092.376	49.089	1.125.942	
Sulawesi Selatan	2.636.297	-	2.035.440	600.857
Sulawesi Tengah	4.254.717	338.384	2.909.371	1.345.346
Sulawesi Tenggara	3.830.579	112.078	3.375.736	454.843
Sulawesi Utara	764.739	536	408.885	355.854
Sumatera Barat	2.380.057	13.980	1.618.632	761.425
Sumatera Selatan	3.456.797	3.976	3.353.752	103.045
Sumatera Utara	3.055.795	117.521	2.009.284	1.046.511
JUMLAH	125.664.550	6.551.624	106.210.820	19.453.730

1. Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan hutan terdapat beberapa parameter yang menyebabkan tidak tercapainya target penetapan kawasan hutan di tahun 2023, yaitu:

- 1) Dokumen hasil Tata Batas tahun sebelum 2023, ada sebagian yang belum di sampaikan ke pusat.
- 2) Dokumen BATB yang telah disampaikan ke pusat, sebagian dikembalikan ke BPKHTL untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sampai dengan Desember 2023 belum disampaikan kembali ke pusat.
- 3) Hasil Tata Batas Tahun 2023 sebanyak 15,9 juta Ha sampai dengan Desember 2023 masih dalam tahap penyelesaian pada tingkat Panitia Tata Batas (PTB) dan penyusunan dokumen BATB.
- 4) Proses penyelesaian Berita Acara Tata Batas kawasan hutan di tingkat Panitia Tata Batas kawasan hutan belum selesai di Bulan Desember 2023, sehingga keluaran dari kegiatan tata batas dimaksud akan ditindaklanjuti untuk penetapan kawasan hutan di Tahun 2024.

2. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Target pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA tahun 2023 seluas 126.268,63 Ha, telah tercapai seluas 173.914,3 Ha atau sebesar 138% dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan sumber TORA melalui pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan (SK Biru) sebanyak 45 SK seluas 107.521,49 Hektar, sebagaimana tabel berikut:

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	LUAS (Ha)
134	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	SK.50/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2023	24-Jan-23	2.499,95
135	Kalimantan Selatan	Tabalong	SK.193/MenLHK/Setjen/PLA.2/3/2023	6 Maret 2023	4.520,29
136	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	SK.214/MenLHK/Setjen/PLA.2/3/2023	13 Maret 2023	34.056,99
137	Kalimantan Utara	Nunukan	SK.131/MenLHK/Setjen/PLA.2/2/2023	13 Feb 2023	487,54
138	Gorontalo	Pohuwato	SK.166/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2023	28 Feb 2023	1.904,97
139	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	SK.390/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2023	18-Apr-23	858,29
140	Kalimantan Utara	Malinau	SK.359/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2023	17-Apr-23	2.190,92
141	Sumatera Barat	Pasaman Barat	SK.419/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	02-May-23	3.494,04
142	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	SK.420/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	02-May-23	2.246,39
143	Sumatera Barat	Tanah Datar	SK.418/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	02-May-23	2.458,31
144	Papua Barat	Manokwari Selatan	SK.315/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2023	05-Apr-23	1.657,13
145	Papua Barat Daya	Tambrauw	SK.316/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2023	05-Apr-23	2.826,98
146	Jawa Timur	Kota Batu	SK.503/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	24 Mei 2023	9,27
147	Aceh	Aceh Besar	SK.530/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	25 Mei 2023	368,89
148	Sumatera Barat	Pasaman	SK.531/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	25 Mei 2023	292,94
149	Aceh	Aceh Timur	SK.549/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	29 Mei 2023	136,53
150	Kalimantan Tengah	Katingan	SK.286/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2023	31-Mar-23	11.945,14
151	Kalimantan Barat	Landak	SK.635/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2023	16 Juni 2023	3.008,33
152	Kalimantan Barat	Melawi	SK.748/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023	10 Juli 2023	2.042,65
153	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	SK.327/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2023	06-Apr-23	613,74
154	Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	SK.551/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	29 Mei 2023	9,49
155	Papua Barat Daya	Raja Ampat	SK.504/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	24 Mei 2023	528,14
156	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	SK.480/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	19 Mei 2023	101,15
157	Sumatera Utara	Nias Utara	SK.791/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023	21-Jul-23	2.982,59
158	Kalimantan Barat	Mempawah	SK.775/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023	14-Jul-23	1.109,67
159	Aceh	Aceh Barat	SK.765/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023	14-Jul-23	66,56
160	Kalimantan Barat	Sanggau	SK.808/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023	24 Juli 2023	5.575,77
161	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	SK.820/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023	31 Juli 2023	166,46
162	Sumatera Selatan	Muara Enim	SK.934/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	21-Aug-23	536,43
163	Sumatera Selatan	Banyuasin	SK.927/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	18-Aug-23	378,64
164	Maluku	Maluku Barat Daya	SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	15-Aug-23	2.728,68
165	Sumatera Utara	Nias	SK.933/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	21-Aug-23	1.187,89
166	Sumatera Selatan	Penukal Abab Lematang Ilir	SK.936/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	21-Aug-23	235,92
167	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	SK.932/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	21-Aug-23	294,40
168	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	SK.948/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	22-Aug-23	512,93
169	Sumatera Utara	Mandailing Natal	SK.947/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	22-Aug-23	260,00
170	Kalimantan Timur	Kutai Timur	SK.941/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	22-Aug-23	1.175,48
171	Maluku	Seram Bagian Timur	SK.942/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	22-Aug-23	6.532,63
172	Jawa Timur	Banyuwangi	SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023	13-Sept-23	725,81
173	Jawa Timur	Madiun	SK.1010/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023	13-Sept-23	26,40
174	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	SK.910/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	10 Agustus 2023	226,74
175	Kalimantan Timur	Berau	SK.931/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023	21 Agustus 2023	534,17
176	Sulawesi Selatan	Luwu	SK.1201/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023	10 Nov 2023	165,04
177	Kalimantan Timur	Penajam paser Utara	SK.1197/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023	10 Nov 2023	690,25
178	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	SK.1208/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023	13 Nov 2023	3.151,10
45					107.521,49

2. Penegasan Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas 2.495,07 Hektar.

No	Provinsi	Kabupaten	Lokasi	Nomor	Tanggal	Luas (Ha)
1	Maluku	Buru Selatan	WAETUREN	1373/Menhut-VII/1997	1/12/1997	420,7
2	Maluku	Buru Selatan	WAIMULANG	82/Menhut-VII/1997	1/27/1997	673,9

3	Maluku	Buru Selatan	WALBELE	1373/Menhut-VII/1997	1/12/1997	147,2
4	Maluku	Maluku Tenggara	MASTURMARFUN	82/Menhut-VII/1997	1/27/1997	1.253,3
Jumlah						2.495,07

3. Pemutakhiran Pelepasan Kawasan Hutan untuk Alokasi 20% untuk masyarakat seluas 58.724 Ha pada 47 unit pelepasan Kawasan hutan;

No	PROVINSI	NAMA UNIT	NOMOR	Tahun	LUAS 20% (HA)	KOMO-DITAS
1	Sumatera Utara	BARUMUN AGRO SENTOSA	512/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2016	2016	2.551,8	KELAPA SAWIT
2	Jambi	GUBERNUR JAMBI	690/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2017	2017	413,8	KELAPA SAWIT
3	Kalimantan Tengah	HUTANINDO AGRO LESTARI PT	10/1/PKH/PMDN/2017	2017	1.576,4	KELAPA SAWIT
4	Kalimantan Selatan	JHONLIN AGRO LESTARI PT	7111/MENLHK/PKTL/KUH/OTL.0/10/2018	2018	274,9	KELAPA SAWIT
5	Kalimantan Selatan	PERKASA BUMI SAKTI PT	7866/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2018	2018	268,7	KARET
6	Sulawesi Tengah	CIPTA CAKRA MURDAYA PT (I) HARDAYA INTI PLANT PT	517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018	2018	1.992,7	KELAPA SAWIT
7	Kalimantan Tengah	DWIE WARNA KARYA PT	224/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2019	2019	1.232,5	KELAPA SAWIT
8	Kalimantan Tengah	KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT PT	701/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2019	2019	1.715,7	KELAPA SAWIT
9	Kalimantan Tengah	KAPUAS MAJU JAYA PT	118/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019	2019	1.185,9	KELAPA SAWIT
10	Kalimantan Tengah	KOPERASI HAPAKAT	4986/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2019	2019	177,2	KELAPA SAWIT
11	Kalimantan Tengah	MENTHOBISAWIT JAYA PT	5354/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2019	2019	234,2	KELAPA SAWIT
12	Kalimantan Tengah	PRIMA USAHA SUKSES PT	642/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019	2019	1.156,6	KELAPA SAWIT
13	Papua	PRIMA SARANA GRAHA PT	636/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019	2019	4.215,8	KELAPA SAWIT
14	Papua Barat	ANUGERAH SAKTI INTERNUSA PT	896/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019	2019	2.929,8	KELAPA SAWIT
15	Riau	CITRA SARDELA ABADI PT	1044/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2019	2019	487,7	KELAPA SAWIT
16	Riau	EKADAYA SEJATISUKSES PT	728/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2019	2019	148,4	KELAPA SAWIT
17	Riau	KRISNA KERETA KENCANA PT	4696/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2019	2019	1.455,3	KELAPA SAWIT
18	Riau	MEKAR JAYA LESTARI ABADI PT	1018/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2019	2019	37,0	KELAPA SAWIT
19	Riau	OSCAR INVESTAMA	4695/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2019	2019	514,6	KELAPA SAWIT
20	Riau	RIAU SAWITINDO ABADI PT	10547/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2019	2019	538,6	KELAPA SAWIT
21	Riau	SAFARI RIAU PT	9294/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019	2019	148,7	KELAPA SAWIT
22	Riau	SAWIT INTI RAYA PT	3186/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2019	2019	121,4	KELAPA SAWIT
23	Sulawesi Tenggara	PRIMA ALAM GEMILANG PT	826/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019	2019	363,0	TEBU
24	Sumatera Barat	KARBINDO INTERNASIONAL PT	288/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2019	2019	1.001,0	KELAPA SAWIT
25	Sumatera Selatan	HINDOLI PT	1000/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2019	2019	219,8	KELAPA SAWIT
26	Sumatera Selatan	SARI PERSADA RAYA PT	8412/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2019	2019	94,1	KELAPA SAWIT
27	Kalimantan Tengah	BAHAUR ERA SAWIT TAMA PT	427/1/KLHK/2020	2020	3.611,8	KELAPA SAWIT
28	Kalimantan Tengah	HUTAN SAWIT LESTARI PT	86/1/KLHK/2020	2020	1.460,1	KELAPA SAWIT
29	Kalimantan Tengah	INDOTRUBA TIMUR PT	226/1/KLHK/2020	2020	232,2	KELAPA SAWIT

No	PROVINSI	NAMA UNIT	NOMOR	Tahun	LUAS 20% (HA)	KOMO- DITAS
30	Kalimantan Tengah	KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI PT	180/1/KLHK/2020	2020	2.656,9	KELAPA SAWIT
31	Kalimantan Tengah	KARYA DEWI PUTRA PT	182/1/KLHK/2020	2020	146,3	KELAPA SAWIT
32	Kalimantan Tengah	KARYA DEWI PUTRA PT	296/1/KLHK/2020	2020	1.457,1	KELAPA SAWIT
33	Kalimantan Tengah	KATINGAN INDAH UTAMA PT	383/1/KLHK/2020	2020	732,6	KELAPA SAWIT
34	Kalimantan Tengah	KOPERASI MITRA TANI SEJAHTERA	395/1/KLHK/2020	2020	257,3	KELAPA SAWIT
35	Kalimantan Tengah	MUKTI SAWIT KAHURIPAN PT	815/MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/2/2020	2020	255,3	KELAPA SAWIT
36	Kalimantan Tengah	SAWITMAS PARENGGEAN PT	63/1/KLHK/2020	2020	123,5	KELAPA SAWIT
37	Riau	SEKO INDAH PT	235/1/KLHK/2020	2020	174,8	KELAPA SAWIT
38	Riau	SINAR WIDITA PAMARTA PT	224/1/KLHK/2020	2020	197,5	KELAPA SAWIT
39	Kalimantan Tengah	ADITUNGAL MAHAJAYA PT	400/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/2021	2021	171,0	KELAPA SAWIT
40	Kalimantan Tengah	ARCHIPELAGO TIMUR ABADI PT	297/Menlhk/Setjen/PLA. 0/5/2021	2021	2.001,0	KELAPA SAWIT
41	Kalimantan Tengah	BERKAH ALAM FAJARMAS PT	56/1/KLHK/2021	2021	3.718,3	KELAPA SAWIT
42	Kalimantan Tengah	KALIMANTAN RIA SEJAHTER A PT	25/1/KLHK/2021	2021	1.825,7	KELAPA SAWIT
43	Kalimantan Tengah	KARYA LUHUR SEJATI PT	55/1/KLHK/2021	2021	2.823,1	KELAPA SAWIT
44	Kalimantan Tengah	SURYAMAS CIPTA PERKASA P T	57/1/KLHK/2021	2021	3.831,8	KELAPA SAWIT
45	Kalimantan Tengah	SURYA INTI SAWIT KAHURIPAN PT	494/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/8/2021	2021	342,3	KELAPA SAWIT
46	Kalimantan Utara	SEBAKIS INTI LESTARI PT	59/1/KLHK/2021	2021	1.445,5	KELAPA SAWIT
47	Kalimantan Utara	SEBUKU INTI PLANTATION PT	58/1/KLHK/2021	2021	481,5	KELAPA SAWIT
			Jumlah		53.001,2	

4. Pelepasan Kawasan Hutan dari pencadangan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak produktif sebanyak 3 SK seluas 965 Hektar berada pada:
 - a. Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengembangan kota persiapan calon Daerah Otonomi Baru Kapuas Ngaju dan Rumah Sakit Pratama berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.383/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2022 Tanggal 25 April 2022.
 - b. Kabupaten Tanah Laut, Provinsin Kalimantan Tengah untuk pengembangan infrastruktur wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.165/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2021 Tanggal 16 April 2021.
 - c. Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk pembangunan infrastruktur obyek wisata dan jasa di sekitar Danau Sentari berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.42/MenLHK/Setjen/Pla.2/2/2021 Tanggal 8 Februari 2021.
5. Review Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas 1.869 Hektar sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.16/MenLHK/Setjen/Pla.0/1/2023 Tanggal 13 Januari 2023 dan Provinsi Bengkulu seluas 2.340 Hektar sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.533/MenLHK/Setjen/Pla.2/5/2023 Tanggal 25 Mei 2023.

Selain capaian tersebut di atas, juga telah dilaksanakan beberapa dukungan dalam rangka percepatan penyediaan sumber TORA, yaitu:

1. Pencadangan Hutan Produktif yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif untuk Provinsi Aceh sebagaimana SK Nomor: SK.234/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2023 tanggal 16 Maret 2023, seluas 3.810 Hektar.
2. Revisi SK Pencadangan Hutan Produktif yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif untuk Provinsi Sumatera Utara sebagaimana SK Nomor: SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022, seluas 6.702 Ha dengan rincian untuk Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif seluas 5.971 Ha dan Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas 731 Ha.
3. Pelaksanaan Tim Terpadu PPTPKH tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Provinsi Jawa Timur sebanyak 22 Kabupaten/Kota dengan luas kajian seluas 3.952 Ha yang sampai dengan Desember 2023 telah dilakukan pembahasan hasil kajian Tim Terpadu PPTPKH;
 - b) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15 Kabupaten/Kota dengan luas kajian seluas 1.417 Ha yang sampai dengan Desember 2023 telah dilakukan pembahasan hasil kajian Tim Terpadu PPTPKH;
 - c) Provinsi Jawa Barat sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan luas kajian seluas 4.424 Ha yang sampai dengan Desember 2023 telah dilakukan pembahasan hasil kajian Tim Terpadu PPTPKH;
4. Provinsi Banten sebanyak 5 Kabupaten/Kota dengan luas kajian seluas 3.222 Ha yang sampai dengan Desember 2023 telah dilakukan pembahasan hasil kajian Tim Terpadu PPTPKH.

Target penyediaan sumber TORA sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020 - 2024 seluas ±4,1 juta hektar. Progres capaian penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari kawasan hutan sd Desember 2023 seluas 2.920.213 Ha yang terdiri dari Non Eksisting/Non Inver seluas 1.469.999 Ha dan Eksisting/ Inver seluas 1.450.214 Ha, sebagaimana tabel berikut:

No	Kriteria	Luas Peta Indikator PPTPKH REVISI II	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun																							Total 2015-2024	Persen Capaian dari Target	SISA TARGET		
				2015	2016	2017	2018	2019				2020		2021				2022				2023									
								RTRW	Add HUPHHK	Perubahan n Batas (APL)	Perubahan n Batas (APL)	SK Pelepasan Trans	RTRW Substansi dan Batas Tengah	Perubahan Batas dan Batas (APL)	SK Pelepasan dan Batas HPK Tidak Produktif	Penetapan Batas KH Reguler	Perubahan Batas dan Batas (APL)	Penetapan Batas KH Reguler	Update 20% dari Pelepasan KH	Penetapan Trans	RTRW	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan dan Batas HPK TP	SK Pelepasan dan Batas HPK Tidak Produktif	Persetujuan n PB PPTKH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Non Eksisting Hutan Produktif yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif	488.101	430.000	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0										58.724					0	488.082	114%	0			
2	Non Eksisting Hutan Produktif yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.128.634	1.590.000	0	0	0	930.878	0	0	0				696										3.810	965	0	942.688	59%	647.312		
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.492	39.000	0	0	0	39.225	0	0	0															0	39.225	101%	0			
	Jumlah non eksisting	1.677.227	2.059.000	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0	0				696							58.724	0	0	3.810	965	0	1.469.999	71%	29%		
4	Pemukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	422.315	490.000	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0		2.772						1.543				2.495					271.398	55%	218.610		
5	Eksisting Pemukiman fasos dan fasum	657.846	640.000	0		0																	4.209	107.521,6	6	147.087	173.824	74%	411.176		
6	Inver lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	2.313.841	590.000	0	307.516			296.061	34.134	19.778	70.184		21.558	37.755		35.077	66.266		31.679									1.178.824	74%	411.176	
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	2.313.841	590.000	0		0																							1.178.824	74%	411.176
	Jumlah eksisting	3.394.002	2.080.000	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772	21.558	37.755		35.077	66.266	1.543	31.679		2.495	4.209	107.522			147.087	1.450.214	70%	30%		
	TARGET IKU	5.071.229	4.139.000		10%	30%	40%					340.000	46.500			184.400		94.756								126.268					
	REALISASI (APL) PERTAHUN			0	690.614	42.734	268.105					349.973	72.956			95.085		99.487								173.914					
	REALISASI (APL) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.001.453					1.351.426	1.424.382			1.519.467		1.618.955								1.792.869	138				
	PROGRES (APL+KH) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.979.560					2.329.533	2.402.489			2.496.879		2.596.366								2.916.403	2.920.213		1.277.098		
	Persen Capaian Progres			0%	17%	18%	48%					56%	58%			60%		63%								70%	71%		30%		

Penyediaan kawasan hutan untuk redistribusi tanah sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) telah tersedia seluas 2.920.213 Ha yang meliputi:

Kriteria Non- Eksisting/ Non-Inver

1. Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 488.082 Ha sejumlah 242 SK dengan rincian di Pulau Sumatera sejumlah 48 SK, Kalimantan 129 SK, Sulawesi 11 SK, Papua 51 SK dan Maluku 3 SK, yang mana ketentuan ini masih menunggu regulasi lebih lanjut;
2. Alokasi TORA dari HPK yang berhutan tidak produktif seluas 941.417 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
 - a. Telah diterbitkan SK Pelepasan HPK Tidak Produktif sejumlah 23 SK seluas 30.272 Ha yaitu an pemohon: Bupati Natuna, Bupati Kapuas, Menteri ATR/BPN, Kelompok Pemuda Ansor, Bumdes Paminggir Seberang, Bumber Maju Bersama Desa Kambitin, Bumdes Mandiri Desa Serakaman, Bumber Pelita Bali Desa Sunga Bali, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Jayapura, POLDA Papua, Ketua Bumdes Sumber Usaha Kab Hulu Sungai Utara, Bupati Tanah Laut, Bumdes Arthan Jaya Desa Kanubungan, Bumdes Tani Suka Maju Desa Mandin, Bumdes Kelompok Tani Makmur II Desa Sulangit, Kelompok Tani Mawar Putih II, Kel Tani Miho Sejati Desa Panaan, Bumdes Jaya Abadi Desa Sei Pimping, Bumdes Sekar Indah Sejahtera Desa Pamarangan Kiwa.
 - b. Telah terbit SK Penetapan pelepasan Kawasan hutan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kapuas dan Kota Jayapura seluas 1.660,7 Ha.
3. Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan perعتakan sawah seluas 39.229 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;

Kriteria Eksisting/ Inver

1. Pelepasan transmigrasi 271.390 Ha dengan rincian sejumlah 10 SK Pelepasan Transmigrasi seluas 7.385,10 Ha dan 264 surat Penegasan APL seluas 262.460,77 Ha;
2. Penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari hasil penataan batas kawasan hutan reguler seluas 374.272 Ha (tahap I seluas 307.516 Ha, tahap II seluas 35.077 Ha dan tahap III seluas 31.679 Ha)
3. Penyesuaian dari review tata ruang Provinsi Kaltim, Kepri, Sulsel dan Sulteng, seluas 317.619 ha;
4. Status Kawasan hutan yang telah menjadi APL dari addendum konsesi swasta PBPH seluas 34.134 ha;

5. Pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA/PPTPKH sejumlah 178 SK pada 28 provinsi seluas 301.503,70 Ha;
6. Proses Perubahan Batas di 77 kabupaten seluas 147.087 Ha yang telah terbit persetujuan MenLHK, tata batas dan saat ini sedang disusun SK Perubahan Batas (SK Biru).

Pada kriteria Eksisting telah dilakukan Inventarisasi dan verifikasi penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan di 268 Kabupaten dengan rincian sebanyak 178 SK pada 174 Kabupaten telah terbit SK Perubahan Batas pada 28 provinsi seluas 301.503,70 Ha dan sisanya saat ini sedang dalam proses penataan batas kawasan hutan di lapangan hingga penyusunan konsep SK Perubahan Batas. Pemohon penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan terdiri dari Perorangan, Instansi, Badan Sosial/Keagamaan, Masyarakat Hukum Adat.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) telah bersurat sesuai Nomor S.58/PKTL/PPKH/PLA.2/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 kepada Bupati/Walikota terkait Permintaan Data Subyek dan Obyek Permukiman Fasos Fasum & Pembentukan Tim Teknis Per Kabupaten. Sehubungan dengan struktur Tim Terpadu PPTPKH dan Tugas Tim Terpadu PPTPKH sudah diatur dalam PermenLHK No 7 Tahun 2021 Pasal 165 dan Pasal 164 ayat (7).

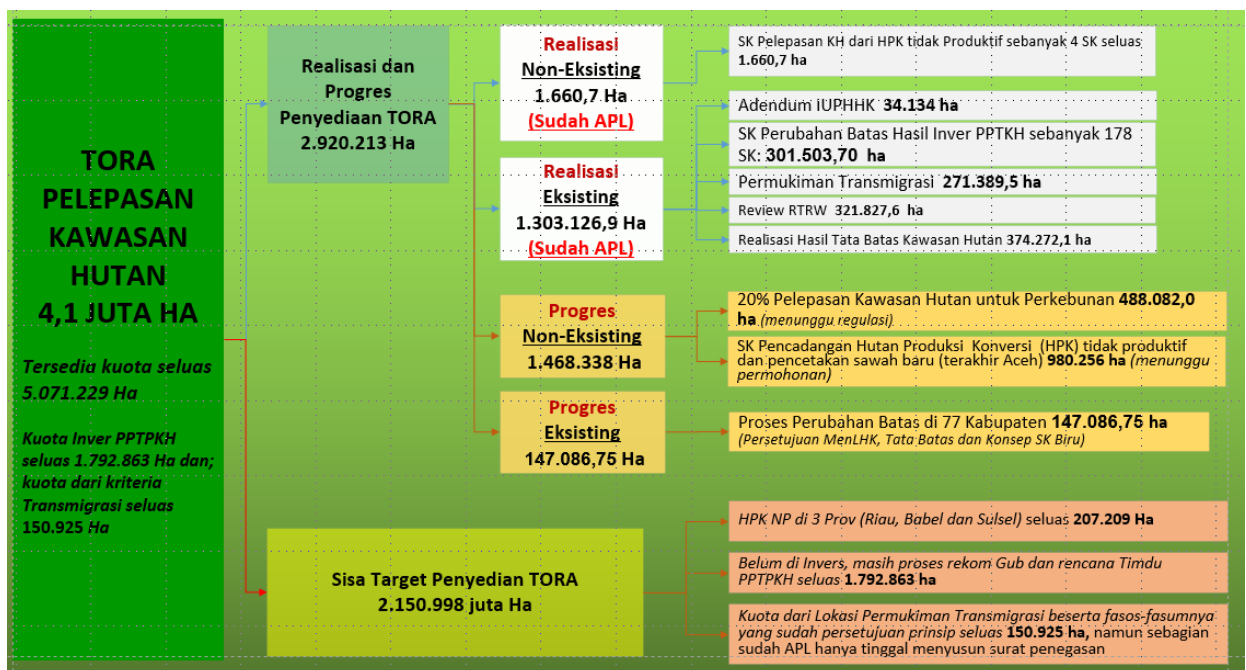
Berjalannya waktu telah dilaksanakan Tim Terpadu di 5 Provinsi (Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) sebanyak 70 Kabupaten dan telah terbit 4 SK Perubahan Batas (Buleleng, Kota Batu, Banyuwangi dan Madiun). Sedangkan, sisanya masih dalam proses tata batas, penyusunan laporan Timdu PPTPKH dan finalisasi Laporan Timdu PPTPKH. Proges pelaksanaan Timdu PPTPKH s/d saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Thp	Progres	Keterangan
1	Bali	8 Kabupaten/Kota: Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Kota Denpasar, Tabanan	-	SK Biru: Kab. Buleleng (SK.1338/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022)	Tidak ada persetujuan pelepasan di 7 Kabupaten selain Buleleng
2	Jawa Timur	10 Kabupaten/Kota: Banyuwangi, Blitar, Jember, Kota Batu, Lumajang, Madiun, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan	I	SK Biru: Kota Batu (SK.503/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 24 Mei 2023) Banyuwangi (SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 13 September 2023) Madiun (SK.1010/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 13 September 2023) Tata Batas: Kab. Jember, Kab. Malang, Kab. Lumajang	4 Kabupaten lain (Kab. Blitar, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, dan Sebagian Kab. Madiun) masih pada tahapan SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 19 Mei 2023) karena belum tersedia anggaran penataan batas
	Jawa Timur	22 Kabupaten/Kota: APBN di 19 Kabupaten (Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung) APBD di 3 Kabupaten (Banyuwangi, Malang, Ngawi)	II	Penyusunan Laporan Timdu PPTPKH	Pelaksanaan Timdu pada kuartal IV 2023
3	Jawa Tengah	15 Kabupaten/Kota: Batang, Kendal, Demak, Pati, Jepara, Rembang,	I	Finalisasi Laporan Timdu PPTPKH	Pelaksanaan Timdu pada kuartal I 2023

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Thp	Progres	Keterangan
		Sragen, Klaten, Blora, Cilacap, Banyumas, Sukoharjo, Pemalang, Grobogan, Pekalongan			
4	Jawa Barat	10 Kabupaten/Kota: Bogor, Bekasi, Karawang, Subang, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Bandung Barat	II	Penyusunan Laporan Timdu PPTPKH	Pelaksanaan Timdu pada kuartal II 2023
5	Banten	5 Kabupaten/Kota: Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Cilegon	-	Penyusunan Laporan Timdu PPTPKH	Pelaksanaan Timdu pada kuartal III 2023

Sementara itu terhadap Kriteria Non Inver juga telah ditetapkan cadangan untuk dialokasikan kepada 20 provinsi dari kriteria Hutan Produksi yang dapat diKonversi yang tidak produktif dan dari program pemerintah untuk pencetakan sawah baru yang mana program tersebut akan ditetapkan dan diarahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluas $\pm$ 980.646 hektar yang kemudian akan dimohonkan untuk pelepasan kawasan hutan yaitu dari Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Kelompok Masyarakat, Perorangan (petani gurem, penyewa tanah, petani penggaran, buruh tani, nelayan kecil, penggarap tambak, pekerja harian lepas, pegawai tidak tetap, PNS gol I dan II). Peruntukan TORA dari HPK tidak produktif untuk Program Pembangunan Nasional/Daerah, Pengembangan wilayah, pertanian tanaman pangan/sawah, kebun rakyat, perikanan, peternakan, fasilitas pendukung budidaya pertanian.

Progres penyediaan sumber TORA sebagaimana yang telah tertuang pada RPJMN 2015-2019 dan dilanjutkan pada RPJMN 2020-2014 seluas 4,1 juta Ha, hingga saat ini capaiannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Pada Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdiri atas alokasi sumber TORA berupa:

- Non eksisting/Non Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH yaitu pada kriteria: (1) Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, (2) Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif, (3) Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru;
- Eksisting melalui Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH yaitu pada kriteria: (1) Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip, (2) Permukiman fasos dan fasum, (3) Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak.

Hingga saat ini, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tanggal 27 Februari 2023.

No	Kriteria SK.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023	LUAS (Ha)
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	488.101
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.128.634
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.492
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	422.315
5	Permukiman fasos dan fasum	657.846
6	Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak	2.313.841
Jumlah		5.071.230

Dalam rangka mengakomodir alokasi penyediaan sumber TORA dan seluruh klaim penguasaan tanah di dalam Kawasan hutan, telah dilakukan revisi peta indikatif PPTPKH sebanyak 8 (delapan) kali. Pada Bulan September 2023 juga telah tersusun konsep SK dan Peta Indikatif PPTPKH Revisi III yang telah mendapatkan beberapa arahan pimpinan dan saat ini masih menunggu arahan selanjutnya atau tandatangan Dirjen PKTL an Menteri LHK. Berikut rincian luasan kriteria pada Peta Indikatif TORA/PPTPKH mulai dari awal s.d saat ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	SK. 180 /MenLHK/ Setjen/Kum.1 / 4/2017	SK.6979 /MenLHK- PKTL/Kuh/Pla .2/ 12/ 2017 REVISI I	SK.3154 /MenLHK- PKTL/Kuh/ Pla.2/5/2018 REVISI II	SK.8716/Men LHK- PKTL/Kuh/Pla .2/12/2018 REVISI III	SK.7434//ME NLHK- PKTL/KUH/PL A.2/9/2019 REVISI IV	SK.5050//ME NLHK- PKTL/KUH/PL A.2/9/2020 REVISI V	SK.698/MENL HK/SETJEN/P LA.2/9/2021 PPTPKH	SK.5564/ MENLHK- PKTL/PPKH/PLA .2/6/2022 PPTPKH REVISI I	SK.903/ MENLHK- PKTL/PPKH/PL A.2/2/2023 PPTPKH REVISI II
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan *	437.937	719.636	417.485	442.391	442.331	442.331	460.523	480.209	488.101
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	2.169.960	1.587.421	1.834.539	1.466.479	1.220.228	1.129.178	1.128.746	1.128.266	1.128.634
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	65.363	71.027	67.028	62.382	60.502	60.502	60.506	60.506	60.492
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	514.909	516.533	502.382	526.255	475.154	458.829	493.514	490.659	422.315
5	Permukiman fasos dan fasum	439.116	588.786	642.835	658.314	674.399	654.002	677.313	660.373	657.846
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	379.227	358.928	366.504	381.424	366.633	364.558		2.176.534	2.313.841
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	847.038	1.015.467	1.118.965	1.457.088	1.731.852	1.737.444	2.219.024		
LUAS INDIKATIF TORA/PPTPKH		4.853.549	4.857.798	4.949.738	4.994.334	4.971.099	4.846.844	5.039.626	4.996.547	5.071.230



- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
 1. Pencapaian target pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA meningkat dari tahun sebelumnya
 2. Dengan terbitnya undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, ada sedikit perbedaan metode dalam pelaksanaan pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Anggaran pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA digunakan untuk mendukung pencapaian target pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA
- Penyebab kegagalan:
 1. Kendala teknis dalam pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang menyebabkan terlambatnya dokumen BATB Kawasan Hutan disampaikan untuk diproses pengesahan dan penetapan kawasan hutan
 2. Lokus Indikatif TORA/PPTPKH berbasis lapangan belum maksimal karena Pemerintah daerah belum seluruhnya mengusulkan untuk dimasukkan dalam peta indikatif, sehingga menyebabkan lokasi yang dimohon untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berada di luar peta indikatif.
 3. Belum semua lokasi yang dicadangkan untuk HPK Tidak Produktif dimohon untuk proses pelepasan kawasan hutan
 4. Belum teridentifikasikannya seluruh lokus perkebunan sawit yang diklaim milik masyarakat (hanya Sebagian saja), sehingga belum seluruhnya terakomodir di dalam peta indikatif

5. Lokus yang akan dilakukan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH perlu di tetapkan dalam SK kegiatan terbangun di Satlakwasdal sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24/2021.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Telah disusun beberapa strategi pencapaian target penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan sebagai berikut:
 1. Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan.
 - a) Perlu dibuat peraturan terkait penarikan 20% di lokasi pelepasan kawasan hutan dan dapat dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, mengingat dengan ketentuan yang mengikat atas lintas sektor.
 - b) Ketegasan dalam penarikan 20% lokasi pelepasan kawasan hutan dengan sesuai ketentuan.
 2. Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif dan Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru.
 - a) Mendorong para stakeholder untuk dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen Masyarakat Indonesia agar dapat menyampaikan permohonan lokasi HPK tidak produktif. Hal ini dapat mengacu pada renaksi pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
 - b) Asistensi intensif terhadap calon-calon pemohon lokasi HPK tidak produktif agar dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal untuk pemenuhan proposal permohonan.
 3. Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip.
 - a) Telah ditindak lanjut penegasan seluas 2.495 ha.
 - b) Mendorong Kementerian PDDT untuk segera menindaklanjuti lokus transmigrasi yang statusnya telah menjadi Areal Penggunaan Lain dan menginventarisasi potensi-potensi areal permukiman transmigrasi dalam kawasan hutan (terutama yang telah memperoleh persetujuan prinsip) dan belum diselesaikan dengan pelepasan kawasan hutan untuk kemudian diusulkan untuk dimasukkan di dalam Peta Indikatif PPTPKH.

4. Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.
 - a) Penyelesaian hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) yang telah berjalan hingga diterbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA.
 - b) Penerapan target dan strategi ulang dalam percepatan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTKH pada masing-masing kabupaten di Indonesia.
 - c) Penyediaan alokasi dana dalam penyelesaian target sumber TORA melalui inventarisasi dan verifikasi PPTKH.
 - d) Telah tersedia kesepakatan Tim GTRA pada Summit GTRA Karimun untuk percepatan penyediaan sumber TORA
- Upaya perbaikan ke depan:
 1. Telah disusun percepatan penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan sesuai Perpres 62 Tahun 2023, sehingga kedepannya dapat mempercepat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
 2. Perlu koordinasi dengan para pihak terkait dengan kebutuhan anggaran, teknis pelaksanaan inver PPTPKH dengan Pemerintah Daerah/Provinsi, Kementerian dan Lembaga dan lainnya.

3. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Penyediaan data dan informasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah dimulai Penyediaan data dan informasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah mulai dikompilasi beberapa tahun yang lalu yakni berupa SK, Peta, laporan maupun dokumen baik dalam bentuk spasial maupun non-spasial yang bersumber dari Para Walidata dan Biro Hukum Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I - XXII, Perum Perhutani Divisi Regional I – III, Sub Direktorat lingkup Direktorat

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang disusun menggunakan prinsip database dengan memaksimalkan teknologi informasi berbasis web.

Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan masuk dalam kegiatan Terselesainya Penetapan seluruh Kawasan Hutan dengan hasil keluarannya adalah 1 (satu) laporan.

Kegiatan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terdiri atas:

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;

Data dan informasi yang disusun meliputi data: (1) kawasan hutan mutakhir berdasarkan Surat Keputusan MenLHK, (2) penataan batas kawasan hutan yang dimonitor oleh para produsen data lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang mana sebagian besar dokumen Berita Acara Tata Batas hasil tata batas Tahun 2021 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan belum disampaikan ke Direktorat PPKH, (3) pengesahan Berita Acara Tata Batas yang digunakan untuk membangun penetapan kawasan hutan, (4) penetapan kawasan hutan yang dikompilasi dari produsen data, (5) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dikompilasi dari Subdit Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan berupa pelepasan kawasan hutan bidang non kehutanan (perkebunan dan lainnya), (6) Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari Surat Keputusan MenLHK tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan, review Rencana Tata Ruang Wilayah, pelepasan dari pencadangan Hutan yang dapat dikonversi tidak produktif, hasil penataan batas kawasan hutan, (7) pemutakhiran data dan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), (8) progres penetapan areal kerja Perijinan Berusaha, (9) konfirmasi kawasan hutan dari para stakeholder, (10) dokumentasi. Data dan informasi yang telah disusun tersebut telah dirangkum dalam bentuk Buku Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023.

Kegiatan pengelolaan data dan informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di dukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

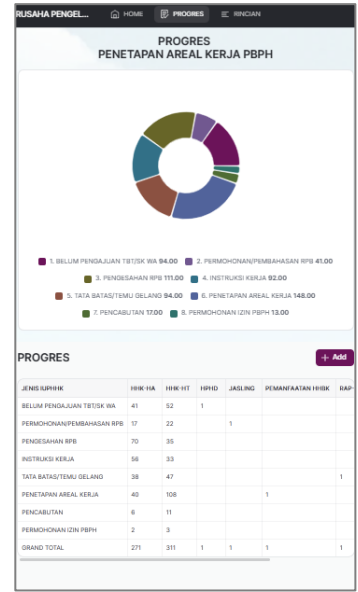
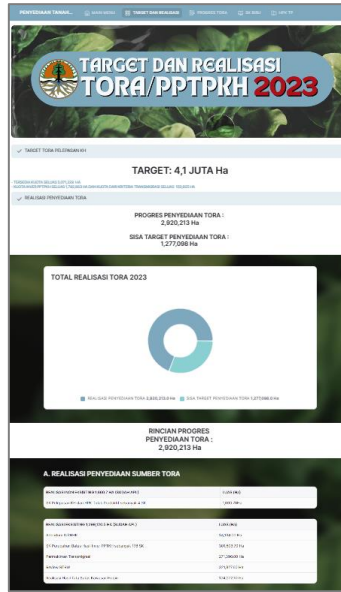
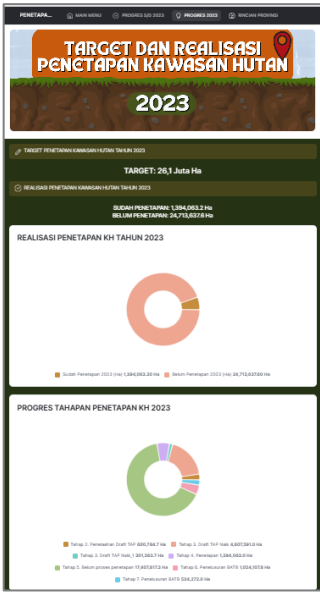
- 1) Rapat konsinyering berupa rapat bersama lintas Kementerian dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Rapat ini bertujuan untuk memutakhirkan data spasial dan data non spasial

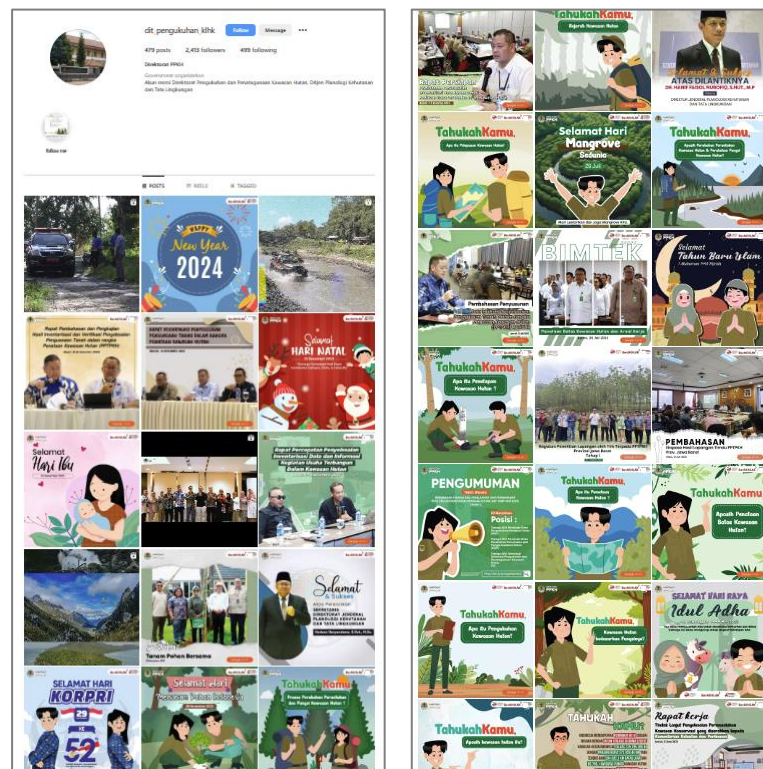


- 2) Rapat kantor berupa koordinasi dengan para Produsen Data yang bertujuan untuk pemutakhiran data spasial dan non spasial secara rutin/periodic



- 3) Pengembangan system informasi untuk menyampaikan data dan informasi ke masyarakat/public, melalui pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun yaitu aplikasi KUKUH, aplikasi Glide dan melalui Media Sosial.





Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah berupa pemutakhiran data serta kompilasi dokumen pendukungnya. Kegiatan ini juga mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian lain, yaitu:

- 1) Kegiatan Stranas Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 2) Kegiatan Kebijakan Satu Peta oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta kegiatan penyelesaian ketidakselarasan PP.43/2021 sebagaimana renaksi yang mewajibkan KLHK untuk melapor secara online melalui aplikasi SIPITTI.
- 3) Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat oleh Kementerian Pertanian
- 4) Kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi/Kabupaten dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- 5) Kegiatan penyediaan lahan transmigrasi oleh Kementerian PDDT

Keluaran kegiatan pengelolaan data dan informasi PPKH tahun 2023 secara umum adalah memutakhirkan data dan informasi tahun sebelumnya. Hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Hutan

Pada tahun 2023 telah terbit SK Kawasan Hutan Provinsi dan SK RTRW sebanyak 3 SK, yaitu

- a) Provinsi Bengkulu, (RTRW) Nomor SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023;
- b) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, (perubahan keempat SK Kawasan Hutan Provinsi Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) Nomor SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- c) Provinsi Kalimantan Selatan, (SK Kawasan Hutan Provinsi) Nomor SK.1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tanggal 25 Mei 2023

Pada Desember 2022 luas kawasan hutan Indonesia seluas 125.795.306 Ha, kemudian pada Desember 2023 luas Kawasan hutan Indonesia menjadi seluas 125.664.550 Ha

2) Penataan batas kawasan hutan

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan tata batas sepanjang 332.187 Km. Pada tahun 2023 telah dianggarkan tata batas sepanjang 44.740 Km, namun hingga data yang masuk sampai dengan Desember 2023 telah dilakukan tata batas sepanjang 38.185 Km, sehingga total Panjang hasil tata batas sampai dengan desember 2023 sepanjang 370.372 Km yang berpotensi dapat menetapkan Kawasan hutan seluas 13,2 juta Ha.

3) Pengesahan Berita Acara Tata Batas

Data pengesahan BATB secara umum telah disahkan untuk menjadi dasar penyusunan penetapan Kawasan hutan tahun 2023 seluas 6,5 juta Ha

4) Penetapan kawasan hutan

Sampai dengan Desember 2022 telah ditetapkan Kawasan hutan seluas 99.659.196 Ha. Pada tahun 2023 telah ditetapkan target penetapan Kawasan hutan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seluas 16,4 juta Ha. Realisasi sampai dengan Desember 2023 telah ditetapkan Kawasan hutan seluas 6.551.624 Ha sebanyak 183 SK, sehingga total luas penetapan sampai dengan Desember 2023 seluas 106.210.820 Ha.

5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Terdapat data penegasan transmigrasi pada Desember 2023 di Provinsi Maluku sebanyak 4 unit seluas 2.491,00 Ha, Data Desember 2022 sejumlah 285 unit dengan luas 897.301,79 Ha. Sehingga total hingga Desember 2023 sejumlah 289 unit dengan luas 899.793,71 Ha.

sampai dengan Desember 2022 terdapat luas pelepasan Kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan non bidang kehutanan sebanyak 936 unit seluas 7.600.6136 ha. Pada tahun 2023 terdapat pelepasan Kawasan hutan sebanyak 8 unit seluas 46.246,26 ha, sehingga sampai dengan Desember 2023 luas pelepasan Kawasan hutan sebanyak 944 unit seluas 7.646.859 ha.

6) Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria

Target pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA tahun 2023 seluas 126.268,63 Ha, telah tercapai seluas 173.914,3 Ha atau sebesar 138%, dengan rincian:

- a) Penyediaan sumber TORA melalui pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan (SK Biru) sebanyak 45 SK seluas 107.521,49 Hektar;
- b) Penegasan Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas 2.495,07 Hektar;
- c) Pemutakhiran Pelepasan Kawasan Hutan untuk Alokasi 20% untuk masyarakat seluas 58.724 Ha pada 47 unit pelepasan Kawasan hutan;
- d) Pelepasan Kawasan Hutan dari pencadangan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak produktif sebanyak 3 SK seluas 965 Hektar;
- e) Review Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bengkulu seluas 4.209 Hektar

Telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan sumber TORA yaitu: (1) Telah diterbitkan Pencadangan Hutan Produktif yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif untuk Provinsi Aceh, (2) Revisi SK Pencadangan Hutan Produktif yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif untuk Provinsi Sumatera Utara; (3) Timdu PPTPKH di

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.

Akumulasi progres capaian penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari kawasan hutan sd Desember 2023 seluas 2.920.213 Ha yang terdiri dari Non Eksisting/Non Inver seluas 1.469.999 Ha dan Eksisting/ Inver seluas 1.450.214 Ha.

7) Pemutakhiran data dan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)

Hingga saat ini, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tanggal 27 Februari 2023. Dalam rangka mengakomodir alokasi penyediaan sumber TORA dan seluruh klaim penguasaan tanah di dalam Kawasan hutan, telah dilakukan revisi peta indikatif PPTPKH sebanyak 8 (delapan) kali. Pada Bulan September 2023 juga telah tersusun konsep SK dan Peta Indikatif PPTPKH Revisi III yang telah mendapatkan beberapa arahan pimpinan dan saat ini masih menunggu arahan selanjutnya atau tandatangan Dirjen PKTL an Menteri LHK

8) Penetapan areal kerja Perijinan Berusaha

Total jumlah pemegang izin IUPHHK/PBPH sampai dengan Desember 2023 sejumlah 572 unit, terdiri dari IUPHHK/PBPH yaitu HHK-HA: 257 unit, HHK-HT: 288 unit, RE: 17 unit, HHBK: 10 unit. Progresnya: (1) Belum mengajukan tata batas sebanyak 94 unit, (2) telah penetapan areal kerja sebanyak 159 unit, (3) sedangkan sisanya masih dalam tahap pembahasan rencana tata batas, instruksi kerja, tata batas, belum temu gelang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan walidata dari IGT Kawasan Hutan, IGT Penetapan Kawasan Hutan, IGT Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan dan Transmigrasi, IGT Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan dan IGT tambahan yaitu Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan. Telah dilakukan pemutakhiran IGT Pengukuhan dan Penatagunana Kawasan Hutan setiap 3 bulan sekali yang kemudian data tersebut disampaikan

kepada Walidata KLHK yaitu Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Data pemutakhiran tersebut digunakan sebagai bahan untuk berbagi pakai dan diunggah di dalam aplikasi SIGAP.

Hasil kinerja yang telah tercapai adalah terselesaikannya dan tersedianya IGT Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka Kebijakan Satu Peta. IGT tersebut telah dipenuhi dan diupload melalui cloud storage berikut <http://103.52.213.138/> yang disediakan oleh unit kliring KLHK yaitu Dit. IPSDH yang mana data yang telah dikumpulkan oleh Unit kliring KLHK diunggah melalui cloud storage disertai dengan mengirim Nota Dinas Updating IGT Dit PPKH Periode September 2023 ke Direktorat IPSDH selaku Unit Kliring KLHK.

Proses kompilasi dengan para walidata Badan Informasi Geospasial (BIG) pada proses tahap klinik kompilasi *hybrid* (luring dan daring) Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk kemudian dilakukan Integrasi verifikasi IGT sesuai standar jaringan data nasional. Beberapa ketentuan yang diverifikasi oleh BIG adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi kelengkapan data sesuai atau tidak sesuai seperti terdiri dari unsur metadata, file xml;
2. Konsistensi penulisan isi attribute IGT (nama obyek, tanggal, nomor sk, keterangan dan lain-lain) sesuai kamus data yang telah diusulkan;
3. Kesesuaian dengan garis pantai terupdate versi BIG;
4. Verifikasi dan validasi kesesuaian letak dan bentuk scan peta dengan spasial;
5. Kelengkapan dokumen mekanisme kerja dan tata cara kerja pembuatan IGT, dokumen kamus/struktur data dan SK Penetapan IGT (khusus untuk IGT Status dan IGT Perencanaan Ruang).

Hasil verifikasi melalui klinik data, apabila belum sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka akan dikembalikan dengan catatan hasil verifikasi IGT untuk dilakukan perbaikan dan untuk dilakukan upload Kembali IGT untuk diproses Kembali.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memperoleh anugerah memperoleh Juara dua/SIGAP Salaka (Perak) dalam SIGAP Award

2023 sebagai Produsen Data Geospasial dan Sub Data Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah membangun sebuah system informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (SiKUKUH) yang terintegrasi di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, sehingga dapat meningkatkan fungsi pelayanan public.

Sistem Informasi Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan (SiKUKUH) terdapat 2 modul aplikasi yaitu :

1. Sistem Informasi Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan (KUKUH)

Sistem ini berbasis pada platform geospasial dengan pendekatan melalui frontend berkonsep portal, yang dapat diakses publik melalui berbagai perangkat seperti desktop, mobile, dan tablet dengan batasan user akses terverifikasi dan teregistrasi. Membangun Portal Sistem Informasi Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan atau SiKUKUH dibagi atas dua jenis portal yang memiliki fungsi dan batasan akses masing-masing. Adapun portal yang dibangun adalah: geoportal berbasis web geospasial untuk menyampaikan berbagai informasi untuk kebutuhan publik dan user portal untuk kebutuhan proses internal sebagai bagian dari pelayanan publik.

Aplikasi pada Sistem Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (KUKUH) yang terdiri atas:

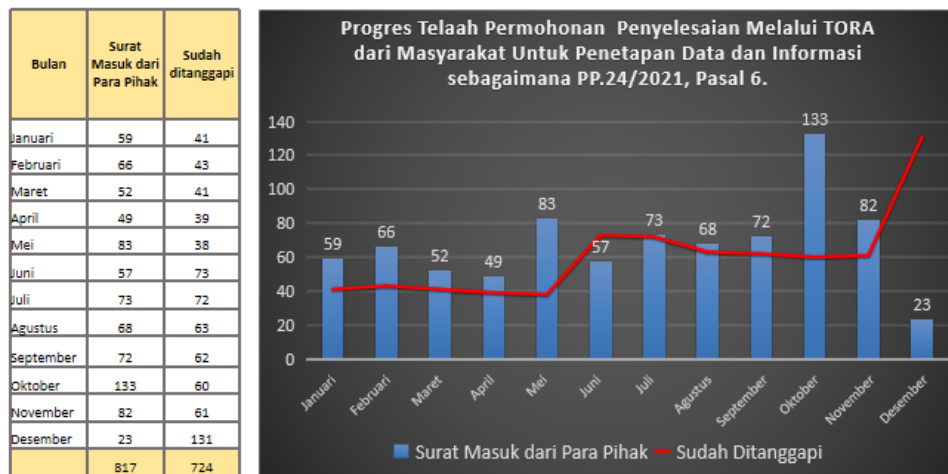
- a. Program GeoPortal Aplikasi Pengukuhan Kawasan Hutan berbasis web spasial Informasi yang bersumber dari data sistem informasi Geospasial dan sistem informasi Sisdok, program ini berupa:
 - 1) halaman antar muka (Front Page) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
 - 2) Web Geoportal yang memiliki informasi Spasial.
 Menampilkan informasi kawasan hutan, jenis dan type data yang akan ditampilkan mengacu pada kamus data spasial dan hasil survey serta diskusi kepada pihak-pihak terkait pemilik data spasial ini.
- b. Program User Portal Aplikasi Pengukuhan Kawasan Hutan berbasis web Non spasial.



Gambar 8. Sistem Aplikasi SIKUKUH

Selain pengelolaan data dan informasi serta pemutakhiran datanya, juga data tersebut digunakan sebagai data untuk melakukan penelaahan dalam rangka penyelesaian kegiatan terbangun di dalam Kawasan hutan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021. Hasil telaah digunakan sebagai bahan Satlakwasdal KLHK untuk menentukan mekanisme penyelesaian permasalahan kegiatan terbangun tersebut. Pada tahun 2023 telah masuk melalui surat ke Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan permohonan penyelesaian kegiatan terbangun di Kawasan hutan sebanyak 817 permohonan. Telaah dan analisis tematik terhadap permohonan tersebut telah ditanggapi sebanyak 724

permohonan dan telah disampaikan ke Satlakwasdal. Rincian perbulannya sebagaimana table dan grafik berikut:



- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Kegiatan pelaksanaan pada tahun ini jauh lebih baik daripada beberapa tahun terakhir hal tersebut dikarenakan teknologi dan sistem informasi semakin berkembang ditambah dengan semakin tersedianya sarana dan prasarana penunjang sumberdaya manusia dan didukung oleh regulasi. Beberapa penyampaian data dan informasi telah disusun regulasi yang dikoordinatori oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan selaku unit kliring/walidata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana hal ini memudahkan aliran data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sampai ke para stakeholder dan masyarakat. Tahun 2021 telah digunakan sarana sistem informasi KUKUH yang berfungsi untuk menginformasikan kawasan hutan kepada masyarakat dan hal ini memberikan efek yang baik seiring dengan semakin berkurangnya permintaan informasi kawasan hutan dari masyarakat. Selain itu juga telah dimaksimalkan peran dari SISDOK yaitu aplikasi yang berguna untuk pengelolaan dan penyediaan dokumen PPKH, hal tersebut memberikan efek yang baik seiring dengan berkurangnya para stakeholder yang mengajukan permohonan copy dokumen.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Tersedianya sistem informasi, regulasi dan Sumber Daya Manusia yang menunjang kegiatan pelaksanaan dalam penyediaan data dan informasi

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, sehingga penggunaan anggaran lebih efisiensi dan kinerjanya terukur.

- Penyebab kegagalan:

Kegagalan dapat disebabkan oleh lambatnya persediaan data dari para produsen data untuk dilakukan pemutakhiran. Selain itu, masih lemahnya kinerja disebabkan oleh ketersediaan jaringan yang handal dan kapasitas server yang terbatas.

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Telah disusun rangkaian penyelesaian hambatan kinerja melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang terukur untuk mengatasi hambatan tersebut yang dikontrol dan monitoring setiap triwulan tahun kegiatan berjalan. Koordinasi antar para produsen data secara berkala baik secara offline maupun online terus dilakukan. Selain itu, telah tersedianya penunjang fasilitas sarana dan prasana dalam pelaksanaan kegiatan serta pembangunan database kawasan hutan.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

Terciptanya keseragaman data dan informasi yang digunakan oleh stakeholder dan masyarakat dalam menunjang tupoksi sehingga meminimalkan permasalahan atau tumpang tindih dengan kawasan hutan. Serta tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, terpercaya dan terkini. Dengan tersedianya data yang mutakhir sangat membantu dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Pada Tahun 2023 juga telah dilakukan klinik Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan Badan Informasi spasial (BIG) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka Kebijakan Satu Peta untuk menyusun rancangan Peta Indikatif Tumpang Tindih Indonesia (PITTI). IGT PPKH telah disampaikan ke BIG dan Tim Sekretariat Kebijakan Satu Peta secara berkala yang mana IGT tersebut telah digunakan untuk bahan penyelesaian permasalahan Tumpang Tindih (PITTI).

- Upaya perbaikan ke depan:

- 1) Perlunya komitmen para produsen data untuk menyediakan data dan bahan yang mutakhir.

- 2) Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang memungkinkan dapat saling berkoordinasi dan mendukung pemutakhiran data.
- 3) Perlu adanya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, fasilitas dan sarana prasarana sehingga dapat menunjang kegiatan untuk kedepannya.

b. Pengelolaan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

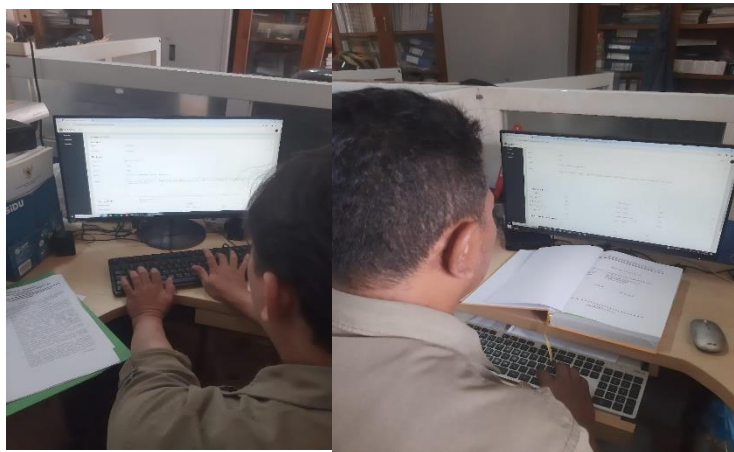
NO	JENIS DOKUMEN	PEMINJAMAN		
		sd Desember 2022	Tahun 2023	s.d Desember 2023
		Dokumen	Dokumen	Dokumen
1.	Berita Acara Tata Batas (BATB)	1.653	74	1.727
2.	Laporan Tata Batas IUPHHK (LPTB)	791	2	793
3.	SK	25	38	63
4.	Dokumen Belanda	16	0	16
Jumlah		2.485	114	2.599

A. Pengelolaan Dokumen Kawasan Hutan

Pengelolaan dokumen Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bersifat rutin maupun insidentil. Secara garis besar kegiatan dokumentasi kawasan hutan meliputi kegiatan pengelolaan dokumen, dokumentasi multimedia, penggandaan dan fotocopy dokumen. Kegiatan pengelolaan dokumen sampai dengan bulan Desember 2023 ini terdapat beberapa kegiatan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, antara lain:

a. *Input Data dan Informasi BATB/LPTB, dan SK*

Merupakan input data informasi dokumen ke dalam aplikasi SISDOK berikut upload file hasil pemidaian dokumen, hasil kegiatan dilaporkan secara berkala.



Gambar 1 . Proses Kegiatan Input Data dan Informasi BATB/LPTB, dan SK
Pengukuhan dan Penatagunan Kawasan Hutan

b. *Penataan/pembenahan Arsip Dokumen Vital/Dokumen Peta*

Merupakan kegiatan penataan arsip/dokumen yang belum tersusun menjadi tersusun pada tempat yang telah ditentukan dan terdata dalam daftar pertelaan arsip, dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan saat pembahasan dalam monitoring dan evaluasi perkembangan kearsipan.



Gambar 2 . Proses Kegiatan Penataan/pembenahan Arsip Dokumen Vital/Dokumen Peta Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan Hutan

c. *Pemeliharaan Dokumen Pengukuhan dan Dokumen Belanda*

Merupakan upaya untuk memelihara dokumen/arsip yang tersimpan dalam lemari arsip tetap terjaga keutuhannya sehingga akan menambah umur simpan dokumen, kegiatan ini meliputi Inspeksi Ruangan : Melakukan pengecekan ruang simpan secara berkala terkait dengan kondisi ruangan, peralatan kearsipan dan kondisi arsip yang tersimpan.

- Fumigasi Arsip :



Gambar 3. Proses kegiatan Fumigasi arsip Dokumen Pengukuhan dan Dokumen Belanda

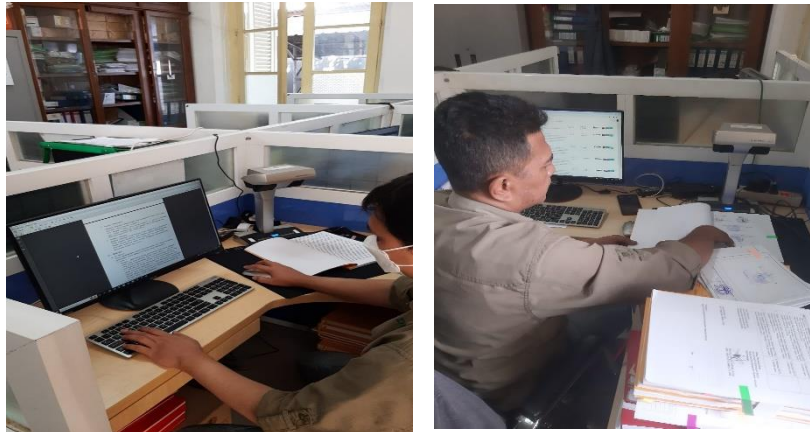
- Pembasmi Koloni rayap



Gambar 3. Proses kegiatan Pembasmi Koloni Rayap Dokumen
Pengukuhan dan
Dokumen Belanda

d. Digitalisasi Dokumen Pengukuhan dan Dokumen Belanda

Merupakan kegiatan melakukan alih media dokumen ke dalam bentuk format *pdf dengan tujuan untuk mencegah, kerusakan secara fisik dan memelihara kelestarian fisik dan informasi dari dokumen yang digitalisasi tersebut.



Gambar 4. Proses Kegiatan Digitalisasi Dokumen Pengukuhan dan Dokumen Belanda

Tabel 19. Pengelolaan Dokumen Kawasan Hutan

NO	JENIS DOKUMEN	PENGELOLAAN DOKUMEN		
		sd Desember 2022	Tahun 2023	s.d Desember 2023
		Dokumen	Dokumen	Dokumen
1.	Berita Acara Tata Batas (BATB)	6.264	319	6.583
2.	Laporan Tata Batas IUPHHK (LPTB)	4.948	34	4.982
3.	SK	5.681	88	5.769
4.	Dokumen Belanda	1.800	0	1.800
Jumlah		18.693	441	19.134

4. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

5. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada tanggal 26 Agustus 2019 dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Pemindahan Ibukota Nusantara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 telah tercantum dalam *Major Project* Pemindahan Ibukota Negara ke luar Pulau Jawa untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penyiapan lahan dari kawasan hutan yang sebagian berada pada kawasan hutan produksi dan di areal kerja PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Langkah awal tindak lanjut penyiapan lahan dari kawasan hutan yang berada pada areal konsesi PT IHM adalah dengan melakukan *addendum* terhadap areal PT IHM dan telah dilakukan *addendum* sesuai SK.838/MenLHK/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 184/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 161.127 (seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT ITCI Hutani Manunggal. Setelah dilakukan *addendum* maka areal tersebut tidak dibebani lagi oleh perizinan di bidang kehutanan sehingga dapat dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan, namun karena areal tersebut adalah kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap maka terlebih dahulu dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Perubahan fungsi kawasan hutan telah dilakukan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.109/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2020 tentang Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm 46,84$ (empat puluh enam dan delapan puluh empat perseratus) hektar dan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas $\pm 41.358,70$ (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan dan tujuh puluh perseratus) hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pertimbangan tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 – 2042, dan Keputusan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara, maka perlu langkah percepatan dengan dukungan peranan masing-masing Tim Transisi termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan arahan Presiden dalam Rapat Internal bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara harus segera dilaksanakan dan arahan Presiden dalam Rapat Internal tentang Kelembagaan dan kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara tanggal 23 Agustus 2022, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.

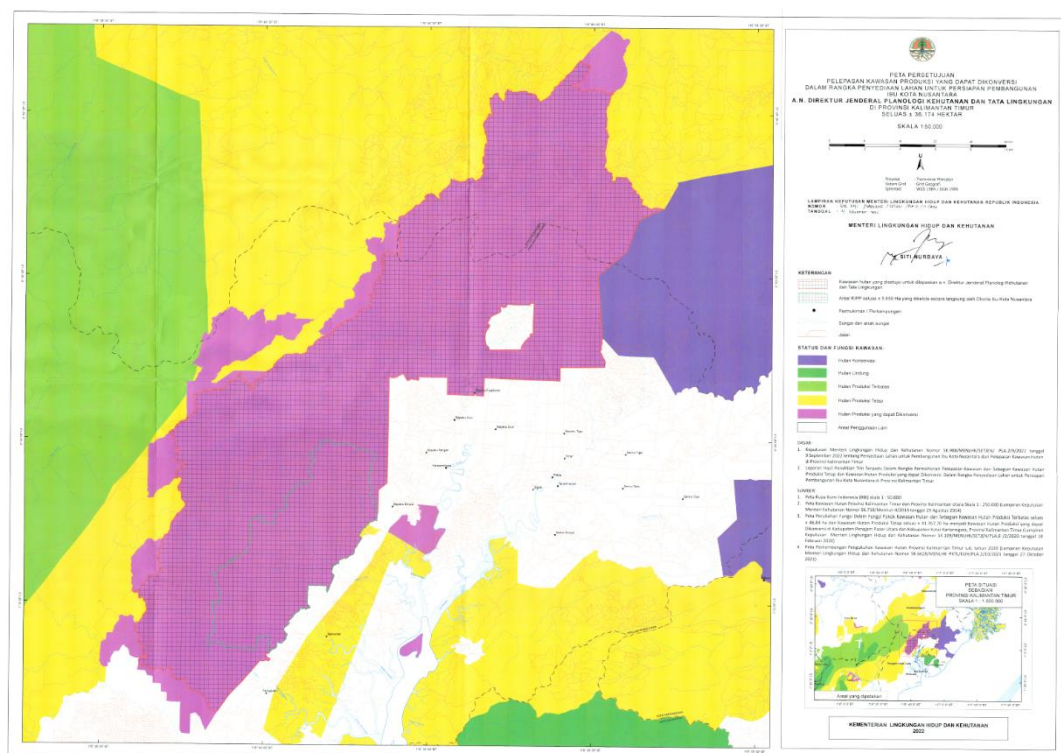
988/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dari Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 988/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2022 tentang Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara dari Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur bahwa "Penerbitan Keputusan Persetujuan Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan dilakukan dengan prosedur Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka penyiapan lahan untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku".

Tahapan penyediaan lahan untuk Ibu Kota Negara yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

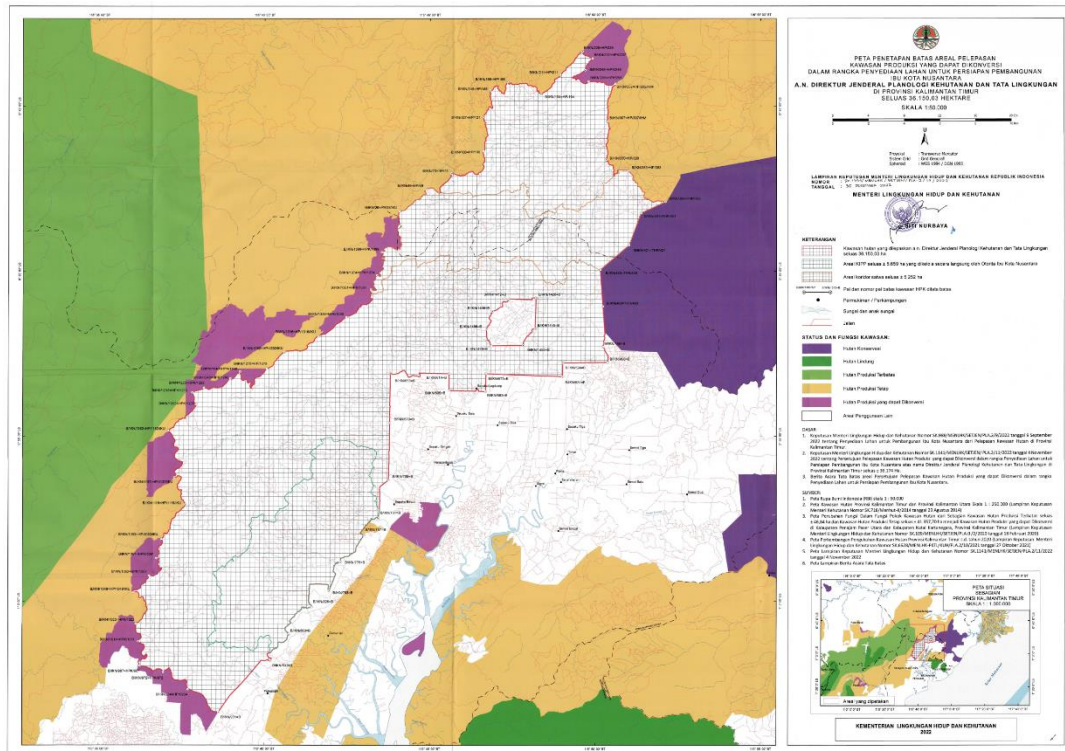
1. Permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan diajukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat Nomor S.1236/PKTL/PPKH/PLA.2/9/2022 tanggal 9 September 2022 hal Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dalam rangka Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, permohonan ini telah dilakukan penelitian Tim Terpadu dengan Rekomendasi bahwa "Sesuai hasil penelitian terhadap aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan, terhadap kawasan hutan yang dimohon seluas ± 36.380 ha (hasil perhitungan ulang ± 36.399 ha), Tim Terpadu merekomendasikan sebagian dari permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dalam rangka penyediaan lahan untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu pada kawasan HPK seluas ± 36.174 (tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) hektar". Tindak lanjut Rekomendasi dan Laporan Tim Terpadu sebagai berikut:
 - a. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1141/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 36.174 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Hektare)
 - b. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi

Kalimantan Timur Seluas 36.150,03 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh dan Tiga Perseratus Hektare)

- c. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 584/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibukota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur Seluas 36.150,03 (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh dan Tiga Perseratus Hektare).



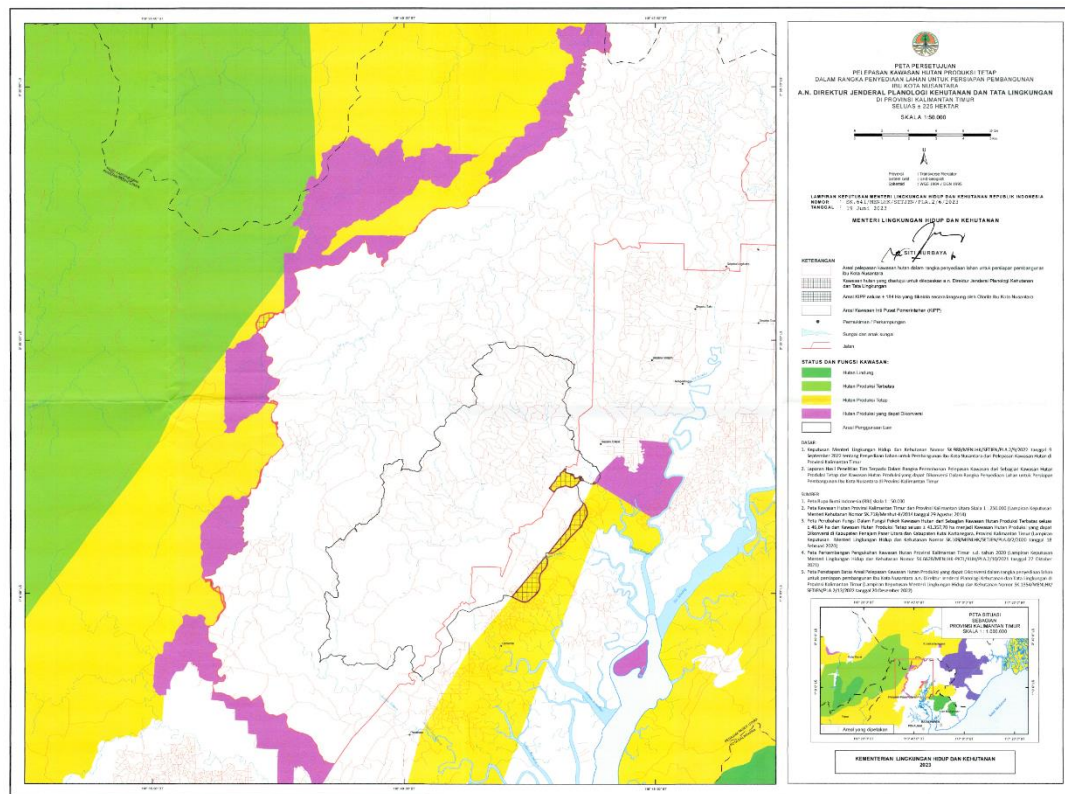
Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara seluas ±36.174 Ha



Peta Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibukota Nusantara Seluas 36.150,03 Ha.

2. Sehubungan dengan areal seluas ± 225 ha yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap yang termasuk dalam areal permohonan seluas ± 36.399 ha sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas, belum dilakukan Pelepasan Kawasan Hutan karena berdasarkan saran Tim Terpadu agar terlebih dahulu ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta dilakukan PBPH PT ITCI Hutani Manunggal seluas ± 61 Ha dan PT ITCI Kartika Utama seluas ± 39 ha. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Proses Persetujuan Pelepasan Kawasan dapat dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional bahwa Program Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Ibu Kota Negara termasuk dalam Proyek Strategis Nasional;
 - b. Telah dilakukan perubahan luas areal kerja PBPH a.n. PT ITCI Hutani Manunggal sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.585/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan perubahan luas areal kerja PBPH PT ITCI Kartika Utama sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.586/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2023 tanggal 9 Juni 2023, sehingga

dapat diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 641/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 225 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Lima Hektare), dan telah dilakukan penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan seluas $\pm 228,69$ ha.



Peta Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Seluas ± 225 Ha.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membutuhkan lahan untuk pengembangan Jalan Bebas Hambatan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan telah dimohonkan oleh Menteri PUPR melalui surat nomor PS.0201-MN/1437 tanggal 6 Juli 2023 jo. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat nomor PS.0201-MN/2108 tanggal 2 Oktober 2023 melakukan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan pada pengembangan ruas jalan bebas hambatan seksi 6A di Provinsi Kalimantan Timur. Tindak lanjut permohonan tersebut sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7681/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2022 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang

Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Jalan Bebas Hambatan Segmen 6A IKN Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Seluas ± 10 (Sepuluh) Hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan Penelitian Tim Terpadu pada tanggal 15 sampai 20 November 2023.

- b. Tim terpadu telah merekomendasikan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan jalan bebas hambatan Segmen 6A IKN seluas ± 10 Ha dengan catatan:
- 1) Badan Otorita IKN harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan belum dapat melaksanakan ketentuan terkait kewenangan persetujuan pelepasan kawasan hutan.
 - 2) Pemohon harus memperbaiki peta permohonan sesuai dengan peta penetapan lokasi yang diterbitkan oleh OIKN.

1.4. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2023 adalah sebesar 25.524.066.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNPB. Alokasi anggaran tersebut guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat PPKH. Pembagian pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2023	Persen
		Rp	Rp	%
Belanja Barang	RM	6.816.626.000,00		
	PN	16.913.122.000,00		
Belanja Modal	RM	400.349.000,00	400.138.800,00	
	PN	1.393.969.000,00	1.362.555.185,00	
Jumlah		13.809.735.000	13751.533.890	

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan guna optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran, Direktorat PPKH melakukan beberapa kali perubahan/revisi dalam rencana anggaran pada Dokumen DIPA.

Tabel 24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
----------------------	-----	-------------	------------------	--------------------	--------------------

			Rp	Rp	%	%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			21.738.237.000	21.660.574.121	99,64	100
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	392.000.000	389.258.211	99,30	100
		051-Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	320.409.000	319.702.884	99,78	100
		052 - Pengendalian Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	35.591.000	34.142.327	95,93	100
		053 - Pengelolaan database Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	26.555.000	25.970.000	97,80	100
		054 - Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	9.445.000	9.443.000	99,98	100
	002 - Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	500.000.000	499.193.478	99,84	100
		051 - Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	190.000.000	189.943.014	99,97	100
		052 - Pengelolaan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	310.000.000	309.250.464	99,76	100
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	11.146.237.000	11.119.621.976	99,76	100
		051-Penelaahan Substansi Penetapan Kawasan Hutan	5.118.852.000	5.113.692.265	99,90	100
		053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	2.014.106.000	2.011.634.561	99,88	100
		055-Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	2.529.260.000	2.522.422.013	99,73	100
		056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1.484.019.000	1.471.873.137	99,18	100
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	9.628.000.000	9.580.844.456	99,51	100
		051- Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	8.856.625.000	8.810.470.009	99,48	100

		052- Pemutakhiran Data dan Peta TORA	771.375.000	770.374.447	99,87	100
	002- Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	72.000.000	71.656.000	99,52	100
		051-Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	72.000.000	71.656.000	99,52	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			3.785.829.000	3.779.803.579	99,84	100
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1.815.000.000	1.812.825.032	99,88	100
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.815.000.000	1.812.825.032	99,88	100
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	760.000.000	757.656.382	99,69	100
		060-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	760.000.000	757.656.382	99,69	100
	EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	911.829.000	911.554.620	99,97	100
		051-pengadaan kendaraan bermotor	494.300.000	494.300.000	100,00	100
		052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	417.529.000	417.254.620	99,93	100
		971-Layanan Prasarana Internal	299.000.000	297.767.545	99,59	100
		051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	299.000.000	297.767.545	99,59	100
CAPAIAN			25.524.066.000	25.440.377.700	99,67	100

Realisasi anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2023 mencapai 99.67% dan capaian fisik sebesar 100 %. Penyerapan anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Sedangkan efisiensi capaian kinerja tahun 2023 bernilai 1,00 yang menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, capaian fisik lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendapatkan capaian fisik tersebut.

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2023, terdapat 5 (lima) output kegiatan yang terkait tugas dan fungsi dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja 'Sangat Baik' hal ini terlihat dari 5 kegiatan yang tercapai rata-rata capaian outputnya 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 99,67 %.

Pandemi mengharuskan kita untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan eksternal. Secara umum adaptasi penyesuaian cara kerja dengan lebih memanfaatkan teknologi informasi, menghindari kontak langsung dalam pelaksanaan tugas, mencegah kerumunan dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan menunjukkan tidak menyebabkan penurunan kinerja. Penyesuaian proses bisnis dan perbaikan tata kelola selama pandemic berperan penting dalam pencapaian kinerja.

4.2. Langkah-langkah di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan:

1. Peningkatan kapasitas SDM
2. Penambahan SDM sesuai dengan beban kerja
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lingkup Direktorat
4. Peningkatan kerjasama dengan para pihak terkait guna mendukung peningkatan capaian sasaran strategis.
5. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien
6. Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas kegiatan.